

2021

DIREKTORAT JENDERAL
PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



LAPORAN KINERJA

LAPORAN

- LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN
- TUGAS DAN FUNGSI
- AKUNTABILITAS KINERJA
- LAPORAN LAINNYA

BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN SURABAYA

Jl. Raya Mojoagung No. 52 Mojoagung Jombang Jawa Timur
Telp/Fax : (0321) 496430, 495842, 495151
WEBSITE : <http://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Tahun 2021 merupakan laporan wajib yang harus dibuat sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini telah disesuaikan dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No. 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003.

Laporan ini mencakup Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT/Renja), Hasil Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan BBPPTP Surabaya sebagaimana diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian.

Pada bulan Oktober 2021 telah disyahkan Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan wujud nyata komitmen antara Plt. Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dalam rangka mewujudkan sasaran kegiatan yang ingin dicapai dan dilanjutkan dengan revisi DIPA bulan Nopember 2021 yaitu : (1). Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan, (2). Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan, (3). Terwujudnya Birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien. Sangat disadari dengan adanya keterbatasan dalam penyusunan, sehingga laporan ini masih terdapat kekurangan dan kelemahannya. Sehubungan dengan itu, kami mengucapkan terima kasih apabila ada

kritik dan saran yang bersifat membangun dan guna penyempurnaan laporan ini.

Akhirnya kami berharap bahwa laporan ini dapat ditelaah lebih mendalam, sehingga menumbuhkan pemahaman dan hasrat untuk meningkatkan kinerja guna mewujudkan aparatur yang mumpuni, organisasi yang sehat, pelaksanaan kegiatan yang mantap dan evaluasi akurat guna menuju sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik, semoga laporan ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama terhadap kinerja dan perkembangan organisasi BBPPTP Surabaya, serta dapat juga dipergunakan lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama penyusunan kinerja Direktorat Jenderal Perkebunan.

Jombang, 3 Januari 2022

Kepala Balai,



K. Purwo Widiarto, MMA.

NIP. 19611219 1989031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan, penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK).

Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Tahun 2021 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, kebijakan, dan program dari unit kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 08/Permentan/OT.14/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBP2TP) Surabaya.

Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya Tahun 2020-2024,

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional, rekayasa genetika dan peredaran benih
2. Meningkatkan bimbingan teknis dan konsultasi di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
3. Meningkatkan pengembangan teknologi perbenihan dan teknologi terapan proteksi tanaman perkebunan
4. Meningkatkan pengembangan Teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih serta agens pengendali hayati untuk OPT Perkebunan
5. Meningkatkan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
6. Meningkatkan pengembangan informasi manajemen perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah :

1. Meningkatkan pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional, rekayasa genetika dan peredaran benih
2. Meningkatkan bimbingan teknis dan konsultasi di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
3. Meningkatkan pengembangan teknologi perbenihan dan teknologi terapan proteksi tanaman perkebunan
4. Meningkatkan pengembangan Teknis pengawasan mutu dan sertifikasi benih serta agens pengendali hayati untuk OPT Perkebunan
5. Meningkatkan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
6. Meningkatkan pengembangan informasi manajemen perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan

Sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2020 yaitu:

1. Meningkatnya pengembangan metode dan teknologi pengujian mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan
2. Meningkatnya kualitas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya
3. Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya.
4. Mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan Akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pada tahun anggaran 2021 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 147.150.647.000,- yang dimanfaatkan untuk mendukung 5 (lima) kegiatan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsinya yaitu Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Perlindungan Perkebunan , Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah , Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan , Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan. Realisasi penyerapan anggaran pada tahun anggaran 2021 adalah Rp. 133.275.394.257,- atau mencapai 90,57%. dengan capaian fisik sebesar 85%,

Hal tersebut artinya bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada Tahun Anggaran 2021 terlaksana dengan baik dan tidak mengalami hambatan yang berarti.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. LATAR BELAKANG.....	10
1.2. TUGAS DAN FUNGSI	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015-2019..	14
2.2. PROGRAM UTAMA 2020-2024.....	16
2.3. ARAH KEBIJAKAN	74
2.4. VISI, MISI DAN TUJUAN BBPPTP SURABAYA 2020-2024.....	89
2.5. KEGIATAN BBPPTP SURABAYA TAHUN 2020 -2024.....	93
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	102
3.1. PENGUKURAN KINERJA.....	102
3.2. EVALUASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA	106
BAB IV PENUTUP.....	112
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Tahun 2021.....	23
Tabel 2 : Nilai Unsur Persepsi Pelayanan Tahun 2021	42
Tabel 3 : layanan Pengujian Mutu Agens Pengendali Hayati (APH) Tahun 2021	53
Tabel 4 : Tabel layanan Pengujian Mutu Formulasi Pestisida, Residu Pestisida dan Logam Berat Tahun 2021	55
Tabel 5 : Layanan Layanan Penyediaan Isolat Agens Pengendali Hayati (APH) Tahun 2021	57
Tabel 6 : Layanan Layanan Penyediaan Formulasi APH dan Pupuk Hayati Tahun 2021	58
Tabel 7 : Layanan Identifikasi OPT dan Rekomendasi Pengelolaan OPT Tahun 2021	60
Tabel 8 : Layanan Penyediaan Data dan Informasi OPT Tahun 2021	62
Tabel 9 : Analisis Capaian Indikator Kinerja Aktivitas	64
Tabel 10 : Aspek- Aspek Kebijakan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024.....	77
Tabel 11 : Arah kebijakan Pelaksanaan pengujian mutu APH.....	78
Tabel 12 : Arah kebijakan Peningkatan Penyediaan inovasi teknologi..	79
Tabel 13 : mendukung pemenuhan pengelolaan benih perkebunan....	79
Tabel 14 : Aspek kebijakan implementasi reformasi birokrasi	80
Tabel 15 : Kisi-kisi Perumusan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024.....	90
Tabel 16 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Perbenihan Tahun 2020 – 2024.....	97
Tabel 17 : Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Proteksi Tahun 2020 – 2024.....	98
Tabel 18 : Indikator Kinerja Satuan Kerja (IKSK) BBPPTP Surabaya Tahun 2020 – 2024	99
Tabel 19 : Perjanjian Kinerja (PK) BBPPTP Surabaya TA. 2021.....	99
Tabel 20 : Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBPPTP Surabaya TA. 2021.....	103
Tabel 21 : Realisasi Anggaran BBPPTP Surabaya T. A. 2021 (per output)	106
Tabel 22 : Capaian Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir.....	108

1.1. LATAR BELAKANG

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya. BBPPTP Surabaya mempunyai peranan strategis dalam memberikan atas produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. Sebagai organisasi yang menangani masalah perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan, BBPPTP Surabaya memerlukan pembenahan sistem koordinasi dan sinkronisasi yang baik dengan didukung oleh aparatur yang profesional. Sejalan dengan itu maka pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Sementara itu, dinamika pertanian dan perkebunan dalam maupun luar negeri saat ini menuntut perubahan pola pikir (*mindset*) dan budaya kerja (*culture set*), ke arah yang lebih mudah, cepat, dan murah. Sehubungan dengan hal tersebut, pembuatan LAKIN 2021 saat ini selain mengikuti bentuk dan formula yang telah mempunyai aturan baku, juga lebih difokuskan pada *output oriented report*. Laporan Kinerja (LAKIN) ini

disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam LAKIN disajikan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahun 2021.

Penyusunan LAKIN ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "Good Governance". LAKIN Tahun 2021 ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA BBPPTP Surabaya.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor :08/Permentan/OT.14/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, maka BBPPTP Surabaya

1. Kedudukan

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

2. Tugas Pokok

BBPPTP Surabaya mempunyai tugas (1) melaksanakan Perbanyakan benih ; (2) melaksanakan Pengembangan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih dan (3) Pengembangan Proteksi Tanaman,

Pengembangan kawasan Organik dan Identifikasi Komoditas spesifik, serta pemberian bimbingan teknis penerapan Sistem Manajemen Mutu dan Laboratorium.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas di atas BBPPTP Surabaya, menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Pelaksanaan Perbanyakkan Benih
- b. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi, Pengujian adaptasi (Observasi), Penilaian Pengujian manfaat dan kelayakan Benih.
- c. Pelaksanaan pengembangan teknis dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan.
- d. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi
- e. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dan pengembangan kawasan organik
- f. Pelaksanaan identifikasi komoditas perkebunan spesifik
- g. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, teknik surveillance, teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, dan taksasi kehilangan produksi serta kerugian hasil
- h. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musum alami organisme pengganggu tumbuhan perkebunan
- i. Pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, serta gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim.
- j. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakkan, penilaian kualitas, pengawasan, evaluasi dan pelepasan agens hayati.
- k. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;
- l. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;

- m. Pengelolaan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
 - n. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
 - o. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; dan
 - p. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.
4. Struktur Organisasi
- a. Kepala Balai
 - b. ~~Kepala Bidang/~~ Koordinator Substansi Perbenihan Tanaman Perkebunan
 - ~~Kepala Seksi/~~ Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknis dan Informasi Perbenihan Tanaman Perkebunan
 - ~~Kepala Seksi /~~ Sub Koordinator Substansi Jaringan Laboratorium Perbenihan Tanaman Perkebunan
 - c. ~~Kepala Bidang /~~ Koordinator Substansi Proteksi Tanaman Perkebunan
 - ~~Kepala Seksi Pelayanan /~~ Sub Koordinator Substansi Teknis dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan
 - ~~Kepala Seksi Jaringan /~~ Sub Koordinator Substansi Laboratorium Proteksi Tanaman Perkebunan
 - d. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - e. Fungsional
 - POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan)
 - PBT (Pengawas Benih Tanaman)
 - PMHP (Pengawas Mutu Hasil Pertanian)
 - Analis Kepegawaian

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024**

Perkebunan merupakan salah satu sub sektor strategis yang secara ekonomi dan sosial budaya memainkan peranan penting dalam pembangunan nasional. Sesuai Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan bahwa penyelenggaraan perkebunan bertujuan untuk :

- a) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b) meningkatkan sumber devisa negara;
- c). menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha;
- d). meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar;
- e). meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri;
- f). memberikan perlindungan kepada Pelaku Usaha Perkebunan dan masyarakat;
- g). mengelola dan mengembangkan sumber daya Perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; dan
- h). meningkatkan pemanfaatan jasa Perkebunan.

Upaya Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Pertanian 2020 - 2024, melalui tugas dan fungsi yaitu melaksanakan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih, melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan dan melaksanakan bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Perkembangan dinamis di tingkat nasional maupun internasional di bidang perbenihan maupun proteksi tanaman perkebunan serta perubahan lingkungan strategis seperti : pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, semakin terbatasnya sumber daya lahan, air dan energi terjadinya perubahan iklim global menuntut pengembangan organisasi BBPPTP Surabaya secara profesional melalui sistem

manajemen mutu (ISO 9001 : 2008, ISO 17025 : 2008 dan ISO 17043 : 2010).

Rencana Strategis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 2020- 2022 disusun sebagai perwujudan amanah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang saat ini memasuki tahap ke-4 Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024

Indikator kemajuan Indonesia adalah negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Visi bagi Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu sebuah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2020-2024 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu :

1. Pembangunan SDM

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Kementerian Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

2.2. PROGRAM UTAMA 2020-2024

**“PERTANIAN YANG MAJU, MANDIRI DAN MODERN
untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”**

Mengacu pada Visi Kementerian Pertanian maka, Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya 2020 – 2024 ini merupakan perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan BBPPTP Surabaya yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi oleh BBPPTP Surabaya pada kurun waktu 2020 – 2024, serta dilengkapi dengan indikator kinerja

yang akuntabel untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi selama periode 2020 – 2024.

A. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Renstra Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya tahun 2020 – 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang nomor 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
2. Undang – Undang nomor 25 tahun 12004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
4. Undang – Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang – Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
8. Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 – 2025;
9. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Presiden nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019.
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. InsPRES nomor 3 tahun 2003 tentang e-government
14. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang : Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
15. Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman

16. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPI)
17. Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil
18. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
19. Peraturan Menteri Pertanian nomor 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BBP2TP Surabaya;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
23. Peraturan Menteri Pertanian nomor 96 / Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/ OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementerian Pertanian;
25. Peraturan Menteri Pertanian nomor 7 tahun 2009 tentang pedoman penilaian usaha perkebunan;
26. Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 tahun 2009 tentang Pedoman Umum SPI;
27. Peraturan Menteri Pertanian nomor 96 / Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
28. Peraturan Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Benih tanaman;
29. Peraturan Menteri Pertanian nomor 64 tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik
30. Peraturan Menteri Pertanian nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah;
31. Peraturan Menteri Pertanian nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
32. Peraturan Menteri Pertanian 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang

- Pendaftaran Pesticida;
33. Keputusan Menteri Pertanian nomor 803/Kpts/OT.210/7/1997 tentang Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
 34. Keputusan Menteri Pertanian nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
 35. Keputusan Menteri Pertanian nomor 3599 tahun 2009 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian nomor 511 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditas Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
 36. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian nomor 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimal Residu Pesticida pada Hasil Pertanian

B. KONDISI UMUM BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN TAHUN 2020 - 2024

1. Aspek Manajerial

A. Organisasi

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perkebunan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya. Keberadaan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam memberikan jaminan atas keselamatan agribisnis perkebunan dan pemenuhan tuntutan pasar dunia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 08/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, merupakan unit kerja eselon 2 b dengan tugas :

- (1) melaksanakan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih ;
- (2) melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan dan
- (3) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas BBPPTP Surabaya menyelenggarakan fungsi :

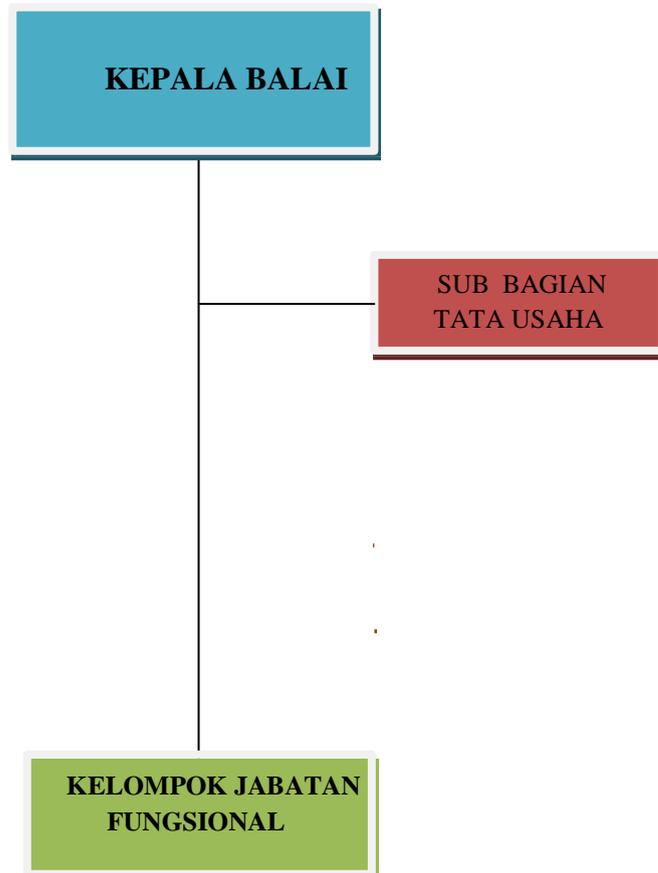
- a. Pelaksanaan Perbanyak Benih
- b. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi, Pengujian adaptasi (Observasi), Penilaian Pengujian manfaat dan kelayakan Benih.
- c. Pelaksanaan pengembangan teknis dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan.
- d. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi
- e. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan, dan pengembangan kawasan organik
- f. Pelaksanaan identifikasi komoditas perkebunan spesifik
- g. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, teknik surveillance, teknis pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, dan taksasi kehilangan produksi serta kerugian hasil
- h. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musum alami organisme pengganggu tumbuhan perkebunan
- i. Pelaksanaan identifikasi, analisis data serangan dan faktor yang mempengaruhi organisme pengganggu tumbuhan perkebunan, serta gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim.
- j. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyak, penilaian kualitas, pengawasan, evaluasi dan pelepasan agens hayati.
- k. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida serta cemaran pada produk perkebunan;

- l. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- m. Pengelolaan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- n. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan;
- o. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; dan
- p. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga.

Sedangkan susunan organisasi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya adalah sebagai berikut :

- 1. Koordinator Substansi Bidang Perbenihan :
 - a. Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknis dan Informasi Perbenihan
 - b. Sub Koordinator Substansi Jaringan Laboratorium Perbenihan
- 2. Koordinator Substansi Bidang Proteksi :
 - a. Sub Koordinator Substansi Pelayanan Teknis dan informasi Proteksi
 - b. Sub Koordinator Substansi Jaringan Laboratorium
- 3. Sub Bagian Tata Usaha
- 4. Pejabat Fungsional :
 - a. Pengawas Benih Tanaman (PBT)
 - b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)
 - c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)
 - d. Analis Statistik (statistisi)
 - e. Analis kepegawaian

BAGAN ORGANISASI
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN SURABAYA



B.**SUMBER DAYA MANUSIA**

Sampai dengan 31 Desember Tahun 2021, pegawai BBPPTP Surabaya berjumlah 121 orang PNS Pusat yang terdiri dari 89 Orang di BBPPTP Surabaya sedangkan 32 orang di UPPT di 30 Kabupaten yang ada di provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan golongan dan tingkat pendidikan pegawai menunjukkan jumlah golongan I sebanyak 0 orang; golongan II sebanyak 5 orang; golongan III sebanyak 100 orang dan golongan IV sebanyak 16 orang; sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan lulusan SD sebanyak 0 orang; lulusan SMP sebanyak 1 orang; lulusan SMA sebanyak 8 orang; lulusan Diploma /D3 7 orang; lulusan S1/D4 sebanyak 69 orang dan lulusan S2 sebanyak 36 orang.

Tabel 1. Data Pegawai Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Golongan (orang)			
		I	II	III	IV
1	SD	0			
2	SMP		1		
3	SMA		3	5	
4	D3		1	6	
5	S1 / D4			65	4
6	S2			24	12
7	S3				
	Jumlah	-	5	100	16

C.**PROGRAM DAN ANGGARAN**

Program pembangunan perkebunan 2020 – 2024 Direktorat Jenderal Perkebunan adalah peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan melalui optimasi dan dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan oleh BBPPTP Surabaya. Prioritas kegiatan ini adalah memfasilitasi pelayanan sertifikasi benih (jumlah bibit yang disertifikasi) dan

peningkatan jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan. Sedangkan fokus kegiatan yang dijabarkan melalui program kerja meliputi :

1. Pengembangan teknologi terapan perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan
2. Pengembangan teknologi Agens Pengendali Hayati
3. Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih
4. Pengembangan Jaringan Laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
5. Pengembangan Pelayanan Teknis dan Informasi Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Pengembangan dan pemberdayaan Sumberdaya manusia (SDM)
7. Pengelolaan ketatausahaan, administasi keuangan, pelaporan dan pelengkapan

D.

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Akuntabilitas merupakan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang dan kritis terhadap pola penyelenggaraan pemerintah. Lima komponen utama yang harus dipenuhi oleh semua unit kerja adalah: perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kerja. Kondisi tersebut merupakan pendorong dalam upaya-upaya peningkatan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman (BBPPTP) Surabaya. Untuk menuju *Good Governance* maka BBPPTP Surabaya harus membuat perencanaan dan capaian kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP.

ASPEK TEKNIS

A. **SUBSTANSI PERBENIHAN**

Bidang perbenihan mempunyai tugas melaksanakan Perbanyakan benih, pengembangan pengujian dan pengawasan mutu benih dan pemberian bimbingan teknis sistem manajemen mutu dan laboratorium perbenihan dengan fungsi antara lain pelaksanaan penilaian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar dan pelaksanaan pemantauan benih yang beredar lintas provinsi.

Layanan Substansi Perbenihan :

1. Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan

Kegiatan layanan rekomendasi di perbenihan yang dilaksanakan meliputi :

a) Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Di Wilayah Kerja

Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Layak Edar, bertujuan :

- Menjaga kemurnian varietas;
- Memelihara mutu benih;
- Memberikan jaminan kepada pengguna benih;
- Memberikan legalitas kepada produsen benih.

Sasaran kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dalam Rangka Pemberian Sertifikat Layak Edar yaitu target benih yang diperiksa sejumlah 11.159.600 batang.

Tempat dan lokasi kegiatan sertifikasi meliputi :

- Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang
- CV. Joyo Rosan Kediri

- Direktorat Jenderal Perkebunan Jakarta
- Kelompok Tani Karya Mandiri, Dompus Nusa Tenggara Barat
- PG. Rajawali I / PG Kreet Baru Malang
- PT. Jhonlin Batu Mandiri, Sulawesi Tenggara
- PT. Tiran Sulawesi, Sulawesi Tenggara
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Bogor
- Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon
- CV. Gotama Jember Jawa Timur
- CV. Indonesia Hijau Jember Jawa Timur
- CV. Lang Buana Blita Jawa Timur
- CV. Wahana Mukti Cipta Sulawesi Selatan
- Kelompok Usaha Penangkar Bibit Buntu Pesele Sulawesi Selatan
- Koperasi Serba Usaha Agro Mandiri
- PT. Triwana Lestari Abadi Sulawesi Selatan
- Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia
- UD. Puri Indah Kediri Jawa timur
- Usaha Pembibitan Harapan Jaya Sulawesi Selatan

Pelaksanaan kegiatan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Dalam Rangka Pemberian Sertifikat Layak Edar dilaksanakan sepanjang tahun 2021 dari bulan Januari sampai dengan Desember.

- ❖ Output
 - Sertifikat Mutu Benih
 - Laporan Hasil Pemeriksaan Benih
- ❖ Outcome
 - Jumlah permohonan sertifikasi selama tahun 2021 adalah sejumlah permohonan dari 20 podusen / penangkar.
 - Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang telah diterbitkan adalah sejumlah 440 Sertifikat.
 - Jumlah benih diperiksa adalah sejumlah 14.103.285 batang sampai bulan Desember 2021.

- BBPPTP Surabaya menargetkan pemeriksaan lapang untuk komoditas perkebunan pada tahun 2021 sejumlah 11.159.000 batang.
 - Persentase pencapaian kegiatan sertifikasi Tahun 2021 adalah 100 %.
 - Rata – lama pembuatan sertifikat mutu benih mulai dari pelaksanaan sertifikasi lapangan sampai dengan sertifikat jadi berkisar antara 5 – 8 hari kerja
- ❖ Permasalahan
- Kurangnya kelengkapan administrasi dari Pemohon/ Produsen/ Penangkar, misalnya Surat Keterangan Asal-usul benih, Surat Pengesahan Sumber Benih, Peta Lokasi, dll. Sehingga menghambat pelaksanaan sertifikasi benih sesuai target waktu yang ditetapkan.

b) Pengujian Mutu Benih Laboratorium

Tujuan dari kegiatan tersebut adalah:

- Memperoleh contoh benih dalam jumlah yang sesuai untuk pengujian mutu benih dan mempunyai komposisi komponen yang dapat mewakili kelompok benihnya;
- Produsen mendapatkan sertifikat mutu benih hasil pengujian laboratorium sebagai jaminan kualitas benih yang akan diedarkan.

Permohonan pengambilan contoh benih/pengujian mutu benih yang masuk ke BBPPTP Surabaya sebanyak 37 permohonan yang berasal dari 6 produsen benih, adapun produsen benih tersebut adalah:

1. PT. Global Agrotek Nusantara (PT. GAN), Malang;
2. PR. Sukun, Kudus;
3. Pusat Penelitian Gula Indonesia (P3GI), Pasuruan;
4. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BALITTAS), Malang;
5. PT. Benih Emas Indonesia (PT. BEI), Pasuruan;

6. Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jember (PUSLITKOKA)

❖ **Output**

Pada tahun 2021, permohonan pengujian mutu benih di laboratorium yang ditangani oleh BBPPTP Surabaya sebanyak 37 permohonan, 146 lot benih yang berasal dari 6 produsen benih. Pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh benih terdiri dari beberapa komoditi perkebunan yaitu : tembakau, tebu, kenaf, kapas, wijen, jarak kepyar, jarak pagar, rosella, kakao dan kopi, dengan jumlah pengujian mutu benih sebanyak 146 pengujian. Adapun output dari kegiatan pengambilan contoh benih adalah hasil uji mutu benih yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat mutu benih.

Waktu penyelesaian pengujian mutu benih di laboratorium berkisar antara 14 – 17 hari dengan melihat dari komoditas yang diuji sesuai dengan dokumen prosedur untuk masing-masing komoditas. Pada komoditas kopi 14 hari; kakao 14 hari; kapas 12 hari Kenaf 8 hari; tembakau 16 hari; wijen 6 hari; rosella 8 hari dan jarak 14 hari.

❖ **Outcome**

Hasil dari kegiatan pengambilan contoh benih ini adalah diterbitkannya sertifikat hasil pengujian mutu benih oleh BBPPTP Surabaya untuk benih yang memiliki mutu sesuai standar yang dipersyaratkan. Sertifikat mutu benih tersebut nantinya dijadikan jaminan bagi produsen benih dalam mengedarkan benihnya kepada pemakai benih.

c) Pengawasan Sumber Benih

Dari hasil pengawasan kebun benih sumber kopi, kakao, dan entres tahun 2021 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Karena adanya pandemi Covid – 19 gelombang ke 2, maka pengawasan kebun benih sumber kopi (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Balai Pengembangan Benih

Tanaman Perkebunan Provinsi Jawa Barat, Kelompok Tani Rahayu di Pangalengan Bandung) tidak dilaksanakan,

2. Untuk pengawasan kebun benih sumber kakao dilaksanakan di PT. Perkebunan Glenmore, Puslitkoka Indonesia KP. Kaliwining dan Puslitkoka Indonesia KP. Sumber Asin Malang.

a) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia KP. Kaliwining

Pada tahun 2021, potensi produksi benih kakao di KP. Kaliwining mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena curah hujan yang tinggi sehingga berdampak kurangnya penyinaran sinar matahari sehingga mengurangi pembungaan serta meningkatnya terjadinya penyakit busuk buah kakao. Tanaman kakao menghendaki sebaran hujan yang relative merata sepanjang tahun, hal ini karena kekurangan air atau kekeringan dapat berpengaruh terhadap penurunan produksi buah kakao.

b) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia KP. Sumberasin

Untuk komoditi kakao, potensi produksi di KP. Sumberasin Malang juga mengalami penurunan, Secara umum keragaan tanaman cukup baik, namun pemeliharaan kebun tetap harus dilakukan secara intensif meliputi pemangkasan tanaman kakao, pengelolaan tanaman naungan, pemupukan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma.

c) PT. Perkebunan Glenmore

Potensi produksi benih kakao tahun 2021 milik PT. Perkebunan Glenmore mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pemeliharaan kebun yang kurang optimal seperti tidak dilakukan pemangkasan produksi dan pemendekan tajuk, pemupukan serta pengendalian hama dan penyakit.

d) PT. Hasfarm Niaga Nusantara Sukokulon

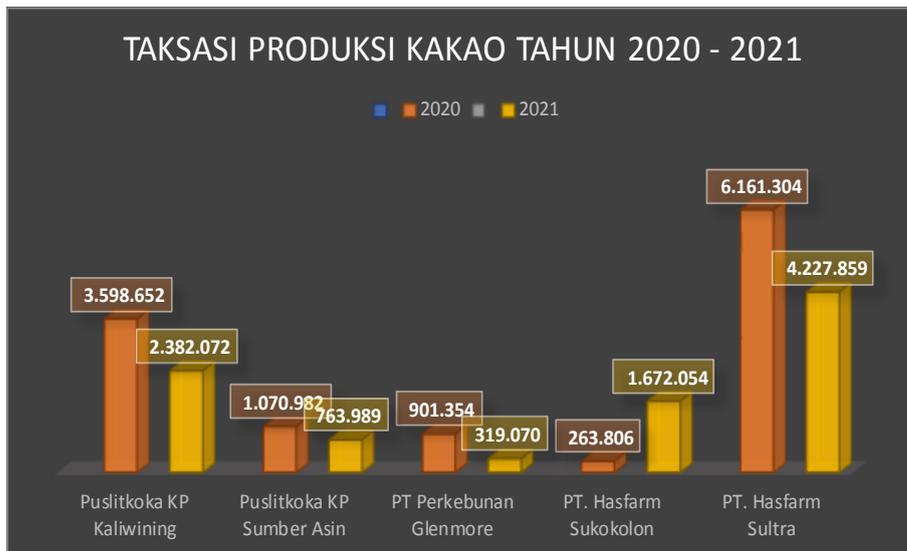
Taksasi Produksi pada tahun 2021 milik PT. hasfarm Niaga Nusantara Sukokulon mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan kebun sudah baik.

e) PT. Hasfarm Niaga Nusantara Sulawesi Tenggara

Untuk kebun milik PT. Hasfarm Niaga Nusantara Sulawesi Tenggara mengalami penurunan. Mengingat Peraturan Perbenihan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 25/Kpts/KB.020/5/2017 tentang Pedoman, Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Kakao, sesuai standar kriteria kebun induk bahwa umur produktif tanaman kakao maksimal 25 tahun sedangkan kebun sumber benih kakao yang dikelola oleh PT. Hasfarm Niaga Nusantara sudah berumur 30 tahun, sehingga blok-blok yang direkomendasikan hanya dapat digunakan sebagai kebun sumber benih dengan batas maksimum 3(tiga) tahun atau sampai dengan tahun 2021. Peredarannya juga hanya disarankan khusus wilayah Sulawesi Tenggara. Mengingat kondisi kebun yang sudah tidak layak sebagai sumber benih sehingga perlu dilakukan penghapusan Surat Keputusan sebagai sumber benih kakao Hibrida F1.

3. Dari hasil pengawasan, semua kebun benih sumber kakao dinyatakan layak sebagai kebun benih sumber.

Hasil Pengawasan kebun benih sumber kakao tahun 2021, sebagaimana disampaikan pada Gambar 19, maka diperoleh data sebagai berikut :



Gambar 1. Taksasi kebun benih sumber kakao tahun 2020 – 2021

4. Pada tahun 2021, dilakukan pengawasan kebun entres milik Puslitkoka Indonesia KP. Kaliwining dan dinyatakan layak sebagai kebun benih sumber entres kakao. Potensi produksi kebun benih sumber entres di wilayah kerja BBPPTP Surabaya pada tahun 2019 – 2020 disajikan pada grafik berikut:

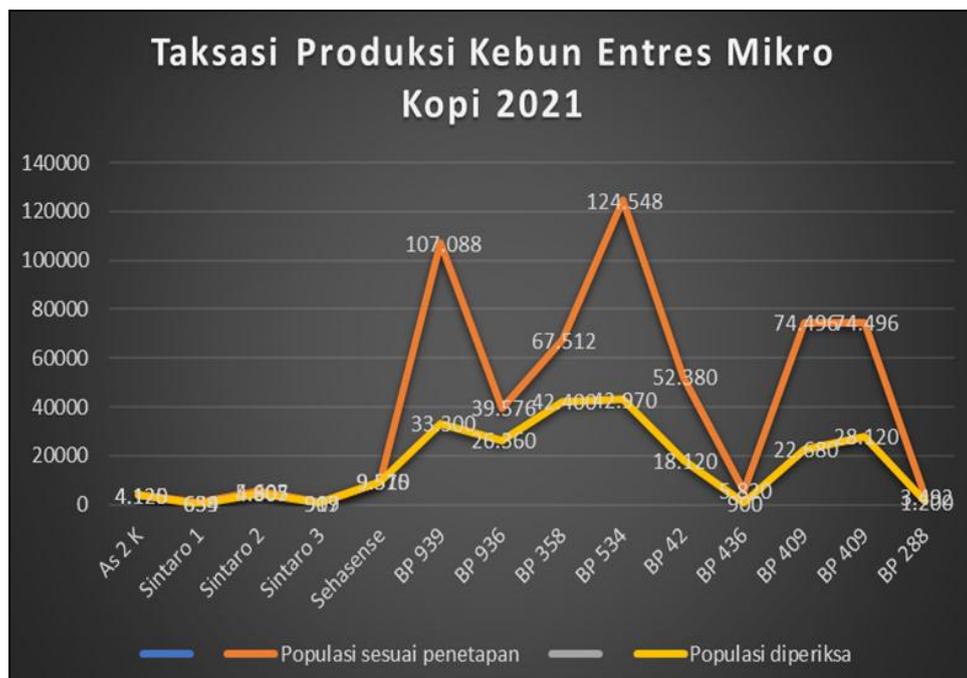


Gambar 2. Taksasi kebun benih sumber kakao tahun 2020 – 2021

Pada tahun 2021, pengawasan kebun benih sumber entres mengalami penambahan kebun dengan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 151/Kpts/KB.020/12/2019 tanggal 18 Desember 2019. Lokasi

kebun terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur. Taksasi produksi pada tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan kurangnya perawatan dan pemanenan entres sehingga muncul pertumbuhan secara generatif.

5. Kebun entres mikro kakao milik Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang berada di KP. Kaliwining kondisinya kurang optimal. Sehingga diharapkan pemanenan harus dilakukan secara selektif dan menyesuaikan dengan kondisi tanaman dan perlu dilakukan perawatan dan pembentukan cabang plagiotrop secara rutin.
6. Sedangkan kebun entres mikro kopi milik Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia yang berada di KP. Kaliwining Kondisi tanamannya juga kurang optimal. Sehingga pemanenan harus dilakukan secara selektif dan menyesuaikan dengan kondisi tanaman dan perlu dilakukan perawatan dan pembentukan cabang plagiotrop secara rutin.



d) Pelaksana Uji Profisiensi

Penyelenggaraan kegiatan uji profisiensi dilakukan secara professional dengan menerapkan sistem manajemen Penyelenggara Uji Profisiensi sesuai dengan persyaratan SNI/ISO:IEC 17043:2010.

Tujuan dari uji profisiensi adalah untuk meningkatkan kinerja laboratorium pengujian mutu benih dan menjamin unjuk kerja pengujian mutu benih khususnya untuk komoditi perkebunan. Meningkatkan unjuk kerja laboratorium peserta uji profisiensi khususnya laboratorium penguji komoditi perkebunan dengan persyaratan sistem manajemen SNI:ISO/IEC 17025:2015 dan Melaksanakan uji profisiensi sesuai dengan SNI:ISO/IEC 17043:2010.

Pada tahun 2021 uji profisiensi diikuti oleh 16 laboratorium pengujian mutu benih dengan sampel uji berupa Benih Wijen varietas Winas 2, Kelas benih Pokok dan Benih Kapas varietas Kanesia 18, Kelas benih Dasar.

e) Pengawasan Peredaran Benih

Kegiatan perlindungan pada distribusi penyebaran benih dapat dilakukan dengan kegiatan pengawasan peredaran benih. Kegiatan pengawasan peredaran benih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendapatkan kepastian bahwa benih yang beredar di pasaran sampai di tingkat pekebun ataupun konsumen masih terjaga mutu benihnya. Kegiatan Pengawasan peredaran benih merupakan salah satu kegiatan yang penting untuk menjaga legalitas benih yang beredar sampai kepada petani pekebun sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kegagalan dalam budidaya komoditas perkebunan. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi : **Pengawasan Peredaran Benih pada Sumber Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Lintas Provinsi pada UPTD Perbibitan di Wilayah Kerja**

Output

Pengawasan peredaran benih yang dilaksanakan di tahun 2021 meliputi :

1) Pengawasan Peredaran Benih pada Sumber Benih

a) Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia

Total Penyaluran benih Kopi Arabika adalah 257.971,5 butir dalam bentuk biji. Sebagian besar penyaluran kopi arabika yaitu pada Provinsi Jawa Timur sebanyak 80.308 butir, Provinsi Sumatera Utara sebanyak 45.673 butir dan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 30.309 butir, Provinsi NTT sebanyak 25.007 butir, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 15.530 butir dan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 16.000 butir.

Adapun benih Kopi Robusta disalurkan sebagian besar pada Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 50.000 batang, Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 2.000 batang, Provinsi Jawa Barat 31.785 batang, Provinsi Jawa Timur 20.000 batang, Provinsi Jawa Tengah 12.800 batang dan Provinsi NTB sebanyak 10.173 batang. Total penyaluran benih kopi Robusta adalah sebanyak 190.232 batang dalam bentuk bibit

Pada Tahun 2021 total penyaluran benih Kakao yaitu sebanyak 135.460 batang dalam bentuk bibit. Sesuai data yang ada diperoleh informasi penyaluran benih kakao hanya pada dua provinsi yaitu Provinsi Bali sebanyak 134.060 batang dan Provinsi NTB sebanyak 1.400 batang.

b) Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas), Malang

Peyaluran terbanyak yaitu kapas dengan lokasi penyaluran di Jawa Timur sebanyak 126.500 gram, Rosela dengan lokasi penyaluran di Jawa Timur sebanyak 20.000 gram, Rosela dengan lokasi penyaluran di Jawa Barat sebanyak 10.000 gram dan Wijen dengan lokasi penyaluran di Jawa Timur sebanyak 14.000 gram.

Sedangkan Jarak Keypar penyaluran yang banyak yaitu di Jawa Tengah sebanyak 10.000 gram.

c) Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI)

Pada tahun 2021 sesuai data yang diperoleh total penyaluran tebu oleh P3GI yaitu pada Provinsi Jawa Tengah sebanyak 2.288.400 lonjoran/bos, Provinsi Jawa Timur sebanyak 6000 bagal, 324.600 budset dan 9455722 lonjoran/bos

d) Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro), Bogor

Total penyaluran benih oleh Balai penelitian tanaman rempah dan obat (Balitro), Bogor pada tahun 2021 yaitu sebanyak 226.261 benih dengan sebaran penyaluran mulai dari Pulau Jawa, Kalimantan dan Sumatera. Terdapat beberapa komoditas yang disalurkan pada tahun 2021 yaitu Serehwangi, Entres Jambu Mete, Kunyit, Lada, Nilam, Temulawak dan Vanili. Dari delapan komoditas tersebut serehwangi paling banyak disalurkan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 159.566 anakan. Penyaluran benih vanili lebih besar dibanding benih lada dengan total penyaluran terbesar untuk benih Vanili yaitu di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebanyak 28.300 dan kemudian disusul Provinsi Jawa Barat sebanyak 13.200 batang ari total keseluruhan penyaluran benih vanili sebanyak 53.600. Sedangkan untuk penyaluran benih lada yang terbesar yaitu pada Provinsi Jawa barat sebanyak 1.000 batang dari total penyaluran sebanyak 1.900 batang.

e) Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balitri), Bogor.

Bogor pada tahun 2021 dengan komoditas yang sama Kopi Arabika yang disalurkan pada 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Banten sebanyak 17.000 batang, Provinsi Jawa Barat sebanyak

70.000 Batang, Provinsi Jawa Tengah sebanyak 10.000 batang dan Provinsi Sulawesi Utara sebanyak 5.000 batang

2) Pengawasan Peredaran Benih Lintas Provinsi pada UPTD Perbibitan di Wilayah Kerja

a. Provinsi Jawa Barat

penyaluran benih oleh Balai Penelitian Tanaman Industri dan Penyegar (Balittri), Bogor untuk benih yang masuk ke Provinsi Jawa Barat adalah kopi arabika sebanyak 70.000 batang. Ketidaksesuaian data antara kedua instansi ini menunjukkan bahwa masih belum ada laporan untuk benih masuk kakao batang bawah dan sambung dari pihak Balittri sebagai penerima benih ke UPTD Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan (BSPMBTP) Provinsi Jawa Barat.

b. Provinsi Jawa Timur

Benih masuk ke Provinsi Jawa Timur yaitu oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV – Unit MInahasa Halmahera dengan komoditi kelapa genjah sebanyak 20.000 butir dan kopi arabika sebanyak 450.000 butir. Selain itu Awaludin Sittompul juga menyalurkan ke Provinsi Jawa Timur dengan komoditi kopi arabika sebanyak 300.000 butir.

c. Provinsi Jawa Tengah

benih masuk ke dalam provinsi Jawa Tengah adalah oleh Balittas, Malang dengan komoditi tembakau sebanyak 675. Jika dibandingkan dengan Grafik 3.4. Penyaluran benih komoditas tembakau sebanyak 500 gram oleh Balittas

d. Provinsi Bali

Benih masuk kelapa genjah salak dari Balitpalma Manado sebanyak 13.100 butir, Kakao Sulawesi 1 dan MCC 02 sebanyak 103.135 batang dari CV. Budi Jaya Lestari Mandiri serta Kopi Arabika Sigarar Utang sebanyak 200.000 butir dari H. Supriatnadanuri, Bandung.

e. Provinsi Sulawesi Barat

Pada Provinsi Sulawesi Barat dengan total penyaluran sebesar 1.419.212 berasal dari pemasukan benih kakao oleh CV. Wahana Multi Cipta sebanyak 100.000 batang, Kelapa Sawit dari PPKS Medan sebanyak 826.217 batang, dan Kopi Robusta dari Puslitkoka Jember sebanyak 492.500 batang.

f. Provinsi Sulawesi Selatan

Benih masuk pada Provinsi Sulawesi Selatan dengan total penyaluran 2.333.500 butir yaitu berasal dari pemasukan benih Kakao oleh PT. Perkebunan Hasfarm Sukokulon sebanyak 291.000 butir, benih kopi sebanyak 10.000 butir dan kakao sebanyak 200.000 butir oleh Puslitkoka Indonesia serta benih kopi sebanyak 1.832,500 oleh UPTD Benih/Bibit Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Bali

g. Provinsi Nusa Tenggara Timur

Benih masuk berupa Kopi Sigarar Utang sebanyak 30.000 butir oleh Bapak Supriatnadanuri Provinsi Jawa Barat yang akan dikirim ke Kabupaten Manggarai , Kakao MCC 02 sambung pucuk sebanyak 6.100 batang yang akan dikirim ke Kabupaten Manggarai Barat, Entres Sulawesi 02 sebanyak 1.000 batang dan MCC 02 yang akan dikirim ke Kabupaten Ende. Selain itu terdapat penyaluran dari Puslitkoka Indonesia yang terdiri dari Kopi Robusta Propeligitim sebanyak 7.980 yang akan dikirim ke Kabupaten Manggarai Barat, Kopi Arabika S 795 sebanyak butir yang akan

dikirim ke Timor Tengah Selatan dan Kopi Robusta Hibiro sebanyak 114.000 butir yang akan dikirim ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumba Tengah.

h. Provinsi Gorontalo

Penyaluran benih masuk ke Provinsi Gorontalo yaitu benih kelapa genjah kuning Nias dari PT. Perkebunan Nusantara XIV sebanyak 2.000 butir, benih Kelapa Genjah Pandan Wangi dari CV. Bumi Mitra dan benih Pala Ternate 1 dari BP2SBP TP Maluku sebanyak 1.000 batan.

i. Provinsi Sulawesi Utara

Sesuai data yang diperoleh penyaluran benih masuk Kopi Arabika dari Puslitkoka Indonesia adalah sebanyak 9.956 batang dan Kopi Robusta sebanyak 109.186 batang.

J. Provinsi Nusa Tenggara Barat

total penyaluran benih keluar kelapa genjah dari Provinsi Sulawesi Utara adalah sebanyak 71.000 batang dalam bentuk bibit dan 150.280 butir dalam bentuk biji.

f) Produksi Benih

Realisasi produksi benih di Nurseri Tanaman Perkebunan BBPPTP Surabaya pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Nurseri Tuban
 - a. Ouput Produksi Laboratorium Kuljar = 1.739 Planlet
 - b. Aklimatisasi I = 10.004 cup
 - c. Aklimatisasi II = 6.349 polibag
 - d. Pembesaran = 1.950 Planter bag
2. Nurseri Probolinggo
 - a. Pengutuhan infrastruktur meliputi : kantor nurseri, pintu gerbang, pavingisasi jalan dan target pembangunan infrastruktur pengairan.

- b. Produksi kopi dengan target 50.000 batang realisasi 33.410 batang siap salur dalam polybag atau 66,82%. Untuk persemain yang dilakukan pada tahun 2021 sebanyak 50.000 benih kopi.
- 3. Nurseri Cianjur
 - a. Pengutuhan Infrastruktur : Kantor Nurseri dan dinding penahan tanah.
 - b. Pembangunan kebun indah : Benih kopi varietas Lini S 795 Arabica dan benih tanaman naungan
 - c. Produksi benih 50.000 tidak bisa dilaksanakan karena ketidakterersediaan benih di Balai benih Provinsi Jawa barat dan Puslitkoka Indonesia
 - 4. Nurseri Lumajang
 - a. Pengutuhan Infrastruktur : Pembuatan tanggul penahan
 - b. Target produksi benih 45.000 batang
 - c. Produksi Kakao sebesar 25.505 batang dengan rincian klon MCC 02 sebanyak 13.191 batang dan klon Sulawesi I sebanyak 12.414 batang
 - 5. Nurseri Polbangan Malang
 - a. Pengutuhan Infrastruktur : Rumah produksi, Rumah Planlet, Green house, sumur bor, pavingisasi dan pagar nursery
 - b. Produksi B tebu : KBI seluas 3,16 ha dari target 4,16 KBN seluas 0,29 ha dari target 0,29 ha.
 - 6. Nurseri Jawa Tengah
 - a. Pengutuhan Infrastruktur : area persemain, area pembibitan, kantor, rumah jaga, rumah produksi, rumah genset, reservoir, gapura
 - b. Produksi benih kelapa Genjah dari target 10.000 batang yang sudah siap untuk disertifikasi Tahap pada bulan Maret – April 2022 sebanyak 5.900 dan sisanya

sebanyak 4.100 batang akan disertifikasi pada bulan Mei – Juni 2022

7. Nurseri Bombana

Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :

- a. Pengisian polybag dengan media campuran tanah dan pupuk kandang sejumlah 24.000 polybag
 - b. Penataan polybag
 - c. Belum tersedianya benih jambu mete varietas Muna berdasarkan surat dari Dinas tanaman pangan horticultural dari perkebunan Pemkab Muna no 5 20/ 260 / X / 2021 tanggal 22 Oktober 2021 terkait ketersediaan benih jambu mete yang gagal panen sebanyak 2x karena kondisi curah hujan yang waktunya maju sehingga proses pembungaan yang I dan II gagal menghasilkan calon benih.
8. Produksi Benih Kelapa Dalam yang merupakan kerjasama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Gorontalo
- a. Target produksi 10.000 batang dengan benih tersemai 14.500 butir
 - b. Progres pertumbuhan 45,34 % (umur 6 minggu setelah semai)

Jumlah Akreditasi laboratorium perbenihan tanaman perkebunan sesuai standar internasional

a. ISO 9001:2015

Dari seluruh rangkaian kegiatan ISO 9001 : 2015 tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa :

1. Implementasi ISO 9001 : 2015 di BBPPTP Surabaya masih terpelihara untuk Substansi Perbenihan (Sertifikasi Mutu Benih Perkebunan) dan Substansi Proteksi (Sistem Layanan Dokter Tanaman (SINANDA), Sistem Informasi Organisme Pengganggu

Tanaman (SIM-OPT), Sistem Bank Isolat (SIBULAT) dan Layanan Produk Formulasi (LADUFOR).

2. Audit dilaksanakan secara silang dengan tugas masing-masing tim adalah sebagai berikut :

- Tim A mengaudit Subkoordinator Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi dan Subkoordinator Jaringan Laboratorium Proteksi
- Tim B mengaudit Manajemen
- Tim C mengaudit Subkoordinator Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan
- Tim D mengaudit Subbagian Tata Usaha



3. Rapat Tinjauan Manajemen ISO 9001 : 2015 dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2021 di BBPPTP Surabaya. Rapat Tinjauan manajemen dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi zoom meeting. Rapat dihadiri oleh Top Manajemen, tim ISO 9001 : 2015 dan penanggungjawab kegiatan.



4. tetap dapat dipertahankan sampai dengan surveillance tahun berikutnya. Renewal

sertifikasi ISO 9001 : 2015 dilaksanakan oleh Sucofindo International Certification Services pada tanggal 29 November 2021 secara daring (*remote audit*). Kegiatan remote audit dilakukan melalui media zoom meeting dengan Auditor Apreiska Gilang Ramadhan, Cesario Fatriantama dan Nur Afifah Jamilah. Secara garis besar, remote audit berjalan dengan baik dan memadai termasuk kegiatan virtual site visit di lapangan. Jaringan komunikasi berjalan lancar selama pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit diawali dengan pre audit terhadap dokumen-dokumen BBPPTP Surabaya. Pre audit dilaksanakan dalam rangka verifikasi awal bagi tim auditor.

5. Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Pelanggan, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,111. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Nilai Unsur Persepsi Pelayanan Tahun 2021

No.	UNSUR PELAYANAN	JUMLAH NILAI PERSEPSI
1.	Kesesuaian Persyaratan	443,00
2.	Kemudahan Prosedur	446,00
3.	Kecepatan Waktu	435,00
4.	Kewajaran Tarif	413,00
5.	Kesesuaian Produk	443,00
6.	Kompetensi	449,00
7.	Perilaku Petugas	455,00
8.	Sarana dan Prasarana	439,00
9.	Penanganan Pengaduan	492,00

Maka untuk mengetahui nilai survey unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut : $\{(389 \times 0,11) + (385 \times 0,11) + (373 \times 0,11) + \dots + (437 \times 0,11)\} = 441,65$

Dengan demikian, nilai Indeks Kepuasan Pelanggan unit pelayanan berdasarkan **Keputusan MENPAN Nomor 14 tahun 2017** hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a) Nilai SKM = 441,65
- b) Rata-rata Nilai SKM = 3,53
- c) Interpretasi SKM = 11041,25
- d) Rata-rata Interpretasi SKM = 88,33
- e) Kinerja Unit Pelayanan
 - Mutu Pelayanan (x) = **A**
 - Kinerja Unit Pelayanan (y) = **Sangat Baik**

b. ISO 17025 : 2017

Pelaksanaan kegiatan akreditasi laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 pada tahun 2020 difokuskan pada kegiatan asesmen reakreditasi laboratorium dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional. Adapun keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan akreditasi laboratorium adalah sebagai berikut :

a. Persiapan secara manajemen dan teknis

Selain melakukan pembayaran iuran akreditasi, laboratorium BBPPTP Surabaya juga melakukan persiapan-persiapan baik secara manajemen dan secara teknis.

1. Persyaratan umum
 - a. Ketidakberpihakan
 - b. Kerahasiaan
2. Persyaratan struktur
 - a. Legal, tanggung jawab
 - b. Identifikasi manajemen yang bertanggung jawab pada laboratorium
 - c. Rentang kegiatan laboratorium

- d. Kegiatan laboratorium memenuhi persyaratan standar
- e. Menetapkan struktur, tanggung jawab kewenangan
- f. Memiliki personil, mempunyai tanggungjawab dan wewenang
PDCA
- g. Integritas dan komunikasi sistem manajemen
- 3. Persyaratan sumber daya
 - a. Umum
 - b. Personal
 - c. Fasilitas dan kondisi lingkungan
 - d. Peralatan
 - e. Ketelusuran metrology
- 4. Persyaratan proses
 - a. Kaji ulang permintaan, tender dan kontrak
 - b. Pemilihan, verifikasi dan validasi metode
 - c. Sampling
 - d. Penanganan benda yang diuji
 - e. Rekaman teknis
 - f. Evaluasi ketidakpastian pengukuran
- 5. Persyaratan sistem manajemen
 - a. Pilihan
 - b. Dokumentasi sistem manajemen
 - c. Pengendalian dokumen sistem manajemen
 - d. Pengendalian rekaman
 - e. Tindakan untuk menghadapi resiko dan peluang
 - f. Peningkatan
 - g. Tindakan korektif
 - h. Audit internal
 - i. Kaji ulang manajemen
- b. Perubahan dokumen yang mengikuti pendekatan proses sesuai dengan standar yang lebih baru. Beberapa perubahan utama yang harus dilakukan antara lain :

1. Penyesuaian ruang lingkup yang mencakup pengujian, kalibrasi dan sampling yang berkaitan dengan kalibrasi dan pengujian berikutnya.
 2. Penyesuaian panduan mutu dan dokumen prosedur sesuai dengan ruang lingkup pengujian.
 3. Standar ISO yang baru memiliki fokus yang lebih kuat pada teknologi informasi dan menggabungkan penggunaan sistem computer, catatan elektronik dan produksi hasil dan laporan elektronik.
 4. Memperkenalkan konsep baru berbasis resiko.
- c. Pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen. Sepanjang tahun 2021 kegiatan audit internal dan kaji ulang manajemen masing-masing dilakukan sebanyak 1 kali.
1. Audit Internal
Pelaksanaan audit internal dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2021 secara link teleconference dengan jumlah 14 ketidaksesuaian dalam kategori 2 yang terdiri 8 LKS dan observasi yang terdiri 6 LKS. persyaratan administrasi dan 3 persyaratan teknis (terlampir). Pelaksanaan audit internal terfokus pada ruang lingkup akreditasi, yang terdiri dari :
 - Benih (Kemurnian fisik, kadar air dan daya berkecambah)
Komoditi : jarak kepyar, jarak pagar, kopi, kakao, kenaf, wijen, tembakau dan kapas.
 - Agens pengendali hayati (Kerapatan spora dan viabilitas)
Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Trichoderma harzianum
 - Laboratorium analisis pestisida. Pengujian kadar bahan aktif klorpirifos, kadar bahan aktif deltametrin, kadar bahan aktif sipermetrin dengan bahan uji pestisida. Pengujian residu karbaril, residu karbofuran dengan bahan uji biji kakao.

2. Kaji Ulang Manajemen

- Pelaksanaan kaji ulang manajemen dilaksanakan pada tanggal 1 November 2021, adapun ruang lingkup kegiatan kaji ulang manajemen meliputi :
 - Pelaksanaan kaji ulang dokumen
 - Persiapan kelengkapan dokumen survailen ISO/IEC 17025:2017
 - Laporan dari staf manajerial dan personil penyelia
 - Hasil audit internal
 - Asesmen dari badan eksternal
 - Hasil uji banding dan uji profisiensi
 - Pengaduan
 - Rekomendasi tentang peningkatan
3. Perjalanan dalam rangka koordinasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium.
- Kegiatan koordinasi penerapan sistem manajemen mutu laboratorium dilakukan di KAN (Komite Akreditasi Nasional). Dalam kegiatan tersebut dilakukan diskusi terkait kegiatan akreditasi laboratorium SNI ISO 17025:2017.
4. Assesmen reakreditasi oleh KAN.
5. Pelaksanaan kegiatan survailen akreditasi oleh KAN akan direncanakan pada bulan Maret tahun 2022. Kegiatan survailen adalah kegiatan rutin untuk peninjauan kinerja laboratorium.

d. Outcome

Dari kegiatan manajemen laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 didapatkan kesimpulan bahwa uantuk tahun 2021 ini kita harus mempersiapkan kegiatan survailen rutin yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional.

c. ISO 17043 : 2010

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya BBPPTP Surabaya sebagai laboratorium pengujian telah terakreditasi berdasarkan SNI/ISO:IEC 17025:2015 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LP-599-IDN dan sebagai laboratorium penyelenggara uji profesiensi telah terakreditasi berdasarkan SNI/ISO:IEC 17043:2010 oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi PUP-010-IDN yang mempunyai tugas berkaitan dengan penyelenggaraan uji profesiensi untuk pengujian mutu benih tanaman perkebunan yaitu antara lain :

1. Penyiapan contoh benih tanaman perkebunan
2. Pelaksanaan pengujian mutu benih
3. Penyiapan perumusan hasil pengujian mutu benih
4. Penerbitan sertifikat hasil pengujian mutu benih
5. Pengembangan teknis dan metode pengujian mutu benih
6. Penyelenggaraan uji profesiensi mutu benih

Penyelenggaraan kegiatan uji profesiensi dilakukan secara profesional dengan menerapkan sistem manajemen Penyelenggara Uji Profesiensi sesuai dengan persyaratan SNI/ISO:IEC 17043:2010.

Uji profesiensi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja laboratorium dan menjamin unjuk kerja pengujian mutu benih khususnya untuk komoditi perkebunan. Laboratorium BBPPTP Surabaya menyiapkan benih homogen dan stabil yang selanjutnya akan di uji oleh laboratorium peserta dan hasil pengujian dianalisis untuk menentukan unjuk kerja laboratoriumnya. Meningkatkan unjuk kerja laboratorium peserta uji profesiensi khususnya laboratorium pengujian komoditi perkebunan dengan persyaratan sistem manajemen SNI:ISO/IEC 17025:2015 dan Melaksanakan uji profesiensi sesuai dengan SNI:ISO/IEC 17043:2010.

Kegiatan Uji Profesiensi dilaksanakan pada tanggal 6-10 Desember 2021 diikuti 16 peserta yang terdiri:

1. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (BPSBP)

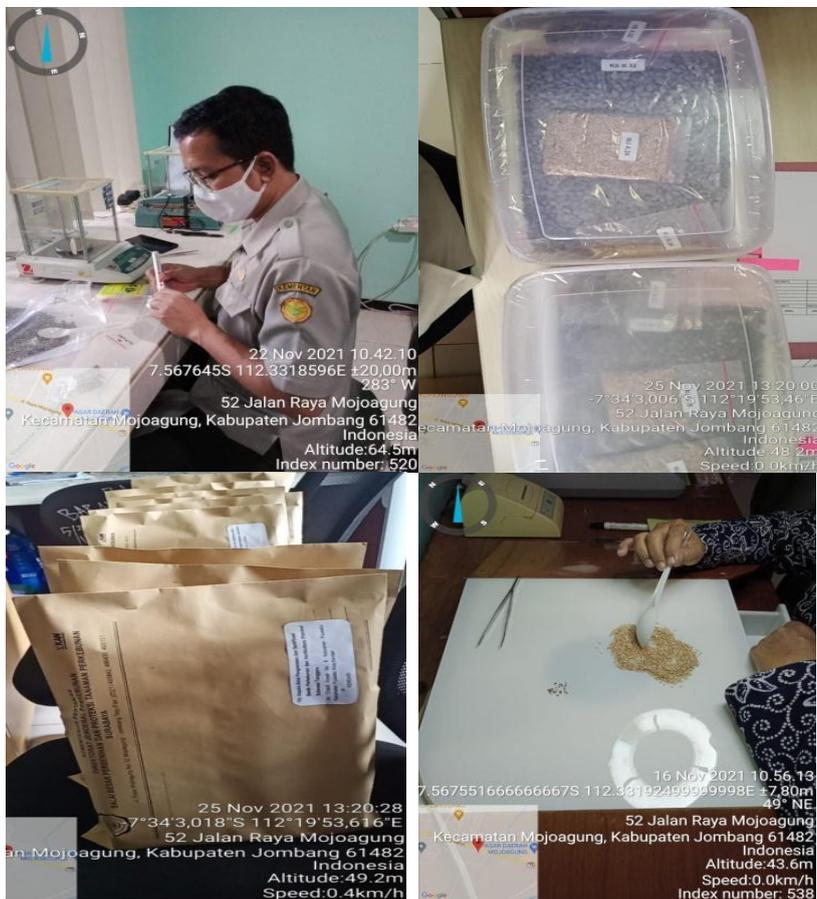
Provinsi Jawa Barat

2. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) Provinsi Jawa Tengah
3. UPTD Balai Pengembangan Perbenihan dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Pertanian (BPPMBTP) Provinsi D.I. Yogyakarta
4. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan (PSBP) Provinsi Jawa Timur
5. UPTD Benih/Bibit Perkebunan Provinsi Bali
6. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSBTP) Provinsi Nusa Tenggara Barat
7. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih (PSB) Provinsi Nusa Tenggara Timur
8. UPTD Balai Pengujian Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPPMSBTP) Provinsi Sulawesi Utara
9. UPTD Balai Sertifikasi Mutu Benih Perkebunan (BSMBP) Provinsi Sulawesi Selatan
10. UPTD Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Benih Perkebunan (PMSBP) Provinsi Sulawesi Tengah
11. UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan dan Hortikultura (BPSBPH) Provinsi Sulawesi Tenggara
12. UPTD Balai Perbenihan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPPSBP) Provinsi Gorontalo
13. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (BALITTAS) Provinsi Jawa Timur.

14. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)
Medan.

15. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP)
Ambon.

16. Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Bekasi Provinsi Jawa Barat.
Komoditi yang digunakan Benih Wijen varietas Winas 2, Kelas benih Pokok, Tahun 2016 dan Benih Kapas varietas Kanesia 18, Kelas benih Dasar, Tahun 2018.



B.

SUBSTANSI PROTEKSI

Bidang Proteksi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi, pengelolaan data dan informasi, dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, serta pengembangan jaringan dan kerja sama laboratorium proteksi tanaman perkebunan Pengembangan teknologi terapan perlindungan tanaman perkebunan diupayakan melalui kegiatan terkait yaitu :

- (1) Perakitan teknologi perlindungan tanaman. Dari tahun 2015 -2019 Balai Besar Perbenihan dan proteksi tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya telah menghasilkan produk yang telah diakui secara nasional yaitu pengembangan Jamur Mikoriza Arbuskular, pengembangan Jamur Mikoriza Arbuskular sebagai pupuk hayati (biofertilizer) telah mendapat sertifikasi produk dari Kementerian Pertanian sesuai dengan sertifikat/Surat Keputusan Persetujuan Pendaftaran Pupuk Hayati oleh Kementerian Pertanian dengan nomor 623/TU.210/M/12/2011 tanggal 2 Desember 2011 dengan nama GLOMOFERT. Selain produk tersebut beberapa produk Agens Pengendali Hayati juga telah memperoleh ijin percobaan dari kementerian pertanian diantaranya NEP (Nematoda Entomopatogen) Formulasi Granular untuk Pengendalian uret tebu *Lepidiotia stigma* dengan nama dagang “Bio Nema” dengan nomor 682/Kpts/SR.140/B/10/2014 tanggal 8 oktober 2014, Jamur *Beauveria bassiana* Formulasi Granular untuk Pengendalian PBKo (*Hypothenemus hampei*) pada Kopi dengan nama dagang “ Bio Bebe” dengan nomor 835/Kpts/SR.140/B/10/2014 tanggal 15 Desember 2014, Serta feromon agregasi *Rhyncoporus* sp. untuk pengendalian hama *Rhyncoporus ferrugineus* pada tanaman kelapa dengan nama

dagang “ Fero- Rhynco” dengan nomor 08/Kpts/SR.330/B/I/2015 tanggal 9 januari 2015.

- (2) Uji coba teknologi perlindungan tanaman melalui demplot dimaksudkan untuk menguji Agens Pengendali Hayati (APH) yang telah dihasilkan untuk diuji keefektifannya dilapang. Kegiatan demplot ini selain dilaksanakan oleh Balai juga dilaksanakan oleh UPTD wilayah Kerja Bidang proteksi melalui kegiatan perikatan.
- (3) Pengembangan metode pengamatan OPT dengan teknik surveilen Dalam implementasi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) pengamatan merupakan kegiatan yang sangat penting. Dengan pengamatan akan dapat diketahui sejak dini situasi OPT dan kondisi faktor pengendali perkembangannya, sehingga ledakan (eksplosi) hama-penyakit dapat dicegah. Satau satu metode yang digunakan adalah Metode Surveillance. Metode surveilen adalah suatu kegiatan untuk mengetahui keberadaan OPT tertentu di suatu wilayah yang dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara teratur dan berkesinambungan. Ada beberapa kelebihan penggunaan metode Surveillance, diantaranya adalah: pemilihan sampel lebih sederhana, dapat memberi gambaran global terhadap situasi OPT, sebagai dasar pengambilan keputusan perlu tidaknya tindakan pengendalian dan dapat digunakan sebagai alat evaluasi keberhasilan suatu pengendalian yang telah dilaksanakan. Pelaksana surveillance adalah petugas UPPT (Unit Pembinaan Perlindungan Tanaman) atau petugas Dinas Perkebunan Kabupaten dan Mantri Perkebunan atau petugas KCD (Kantor Cabang Dinas) di kecamatan terkait. Pada lokasi contoh (kebun petani) pemilik kebun/petani ikut serta dalam pelaksanaan surveillance.

Kegiatan Operasional Laboratorium dilakukan melalui Kegiatan pengembangan jaringan laboratorium dan bimbingan teknis laboratorium ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut : mendapatkan informasi mengenai kondisi dan keadaan laboratorium UPTD Proteksi; mensupervisi

kegiatan pengujian yang dilakukan oleh UPTD Proteksi dan Perbenihan; memberikan bimbingan teknis tentang pengujian mutu agens pengendali hayati; dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi laboratorium UPTD dan memberikan masukan teknis kepada Laboratorium UPTD Proteksi berkaitan dengan penerapan SNI ISO/IEC 17025:2017 dalam rangka akreditasi laboratorium. Sebagian besar laboratorium belum mengetahui tentang SNI ISO/IEC 17025:2017, oleh karena itu pada kegiatan ini disampaikan penjelasan tentang SNI dimaksud dan penerapannya pada laboratorium.

Layanan Substansi Proteksi

a. Pengujian mutu Agens Pengendali Hayati (APH)

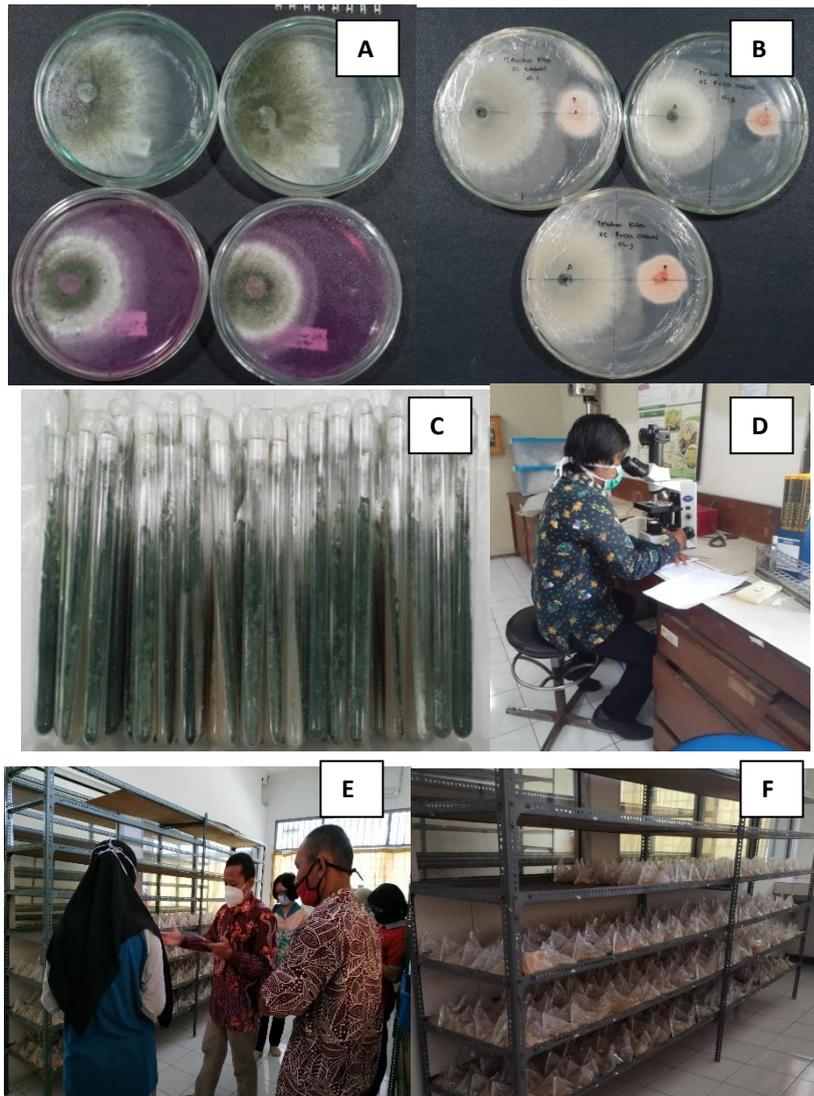
Kegiatan uji mutu Agens Pengendali Hayati (APH) dalam pelaksanaannya mencakup dua kegiatan, yaitu kegiatan uji banding antar laboratorium dan kegiatan *quality control* dan bimbingan teknis. Kegiatan uji banding antar laboratorium bertujuan menilai unjuk kerja laboratorium penguji mutu APH, meningkatkan kompetensi atau kemampuan laboratorium peserta uji banding, dan untuk memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 17025:2017 sebagai laboratorium penguji mutu APH yang terakreditasi. Sedangkan kegiatan *quality control* dan bimbingan teknis bertujuan mengetahui kualitas dan penyebaran penggunaan APH serta pengembangan APH di laboratorium UPTD provinsi di wilayah kerja BBPPTP Surabaya, serta berbagi informasi dan pengetahuan tentang teknik pengambilan contoh APH pada laboratorium produksi APH. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan Februari – November 2021.

Realisasi pelaksanaan kegiatan uji banding antar laboratorium dan kegiatan *quality control* dan bimbingan teknis sampai bulan Desember 2021 adalah telah dilaksanakan skrining APH yang akan digunakan sebagai sampel uji banding (*Trichoderma* spp.), meliputi pengamatan pertumbuhan jamur *Trichoderma* spp, penghitungan kerapatan spora, viabilitas spora dan uji antagonis jamur *Trichoderma* spp. Sementara pada kegiatan *quality control* dan bimbingan teknis telah dilaksanakan pengujian mutu APH dari sampel yang dikirim oleh laboratorium UPTD Provinsi Jawa Tengah, DIY, Banten dan NTB.

Pengujian mutu APH mengacu pada SNI 8027.1:2014 (*Beauveria bassiana*), SNI 8027.2:2014 (*Metarhizium anisopliae*), dan SNI 8027.3:2014 (*Trichoderma* sp). Parameter pengujian mutu untuk *Beauveria bassiana* dan *Metarhizium anisopliae* yaitu kerapatan spora dan viabilitas spora, sementara untuk *Trichoderma* sp. meliputi kerapatan spora, viabilitas spora dan daya hambat (antagonisme). Pengujian mutu APH terdiri dari 2 kegiatan yaitu monitoring dan penerimaan sampel dari pengguna jasa.

Tabel 3. Tabel layanan Pengujian Mutu Agens Pengendali Hayati (APH) Tahun 2021

Kegiatan	Hasil	Penerima Manfaat
Pengujian mutu APH <i>Beauveria bassiana</i> , <i>Metarhizium anisopliae</i> , <i>Trichoderma</i> spp	57 pengujian	UPTD, Dinas Provinsi, swata



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan Uji Mutu APH, A. uji pertumbuhan jamur *Trichoderma* spp. pada media PDA dan *rose bengal*, B. uji antagonisme jamur *Trichoderma* spp. terhadap patogen *Fusarium* sp., C. perbanyakkan jamur *Trichoderma* spp. pada media miring PDA, D. pelaksanaan uji banding antar laboratorium pengujian mutu APH, E. pelaksanaan bimbingan teknis pengambilan sampel APH di UPTD Yogyakarta, F. perbanyakkan APH pada media beras jagung di UPTD Yogyakarta

b. Pengujian Mutu Formulasi Pestisida, Residu Pestisida dan Logam Berat

Kegiatan uji mutu formulasi pestisida, residu pestisida dan logam berat bertujuan untuk menguji mutu, ada tidaknya residu pestisida, cemaran logam berat pada produk perkebunan serta mengawal hasil perkebunan agar memenuhi batas minimum pada logam berat dan residu pestisida. Contoh mutu formulasi pestisida yang akan diuji

diantaranya adalah formulasi pestisida berbahan aktif permetrin, deltametrin, sipermetrin, klorpirifos, diazinon, lamda sihalotrin dan alfa sipermetrin. Sedangkan contoh uji residu pestisida dan logam berat disesuaikan dengan komoditi perkebunan yang berada pada kabupaten di wilayah kerja BBPPTP Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan bulan Januari – Desember 2021. Penerima layanan dari kegiatan ini adalah importir dan juga petani di bidang perkebunan. Pengujian mutu formulasi, residu pestisida dan logam berat terdiri dari 2 kegiatan yaitu monitoring dan penerimaan sampel dari pengguna jasa.

Tabel 4. Tabel layanan Pengujian Mutu Formulasi Pestisida, Residu Pestisida dan Logam Berat Tahun 2021

Kegiatan	Hasil	Penerima Manfaat
Pengujian formulasi pestisida berbahan aktif permetrin, deltametrin, sipermetrin, klorpirifos, diazinon, lamdasihalotrin dan alfa sipermetrin dan pengujian residu pestisida dan logam berat	25 pengujian mutu pestisida, 64 pengujian residu pestisida dan 30 pengujian logam berat	Importir dan petani





Gambar 2. Pelaksanaan kegiatan Uji Mutu Formulasi Pestisida, Residu Pestisida dan Logam Berat, A-B. Pengambilan sampel kopi di kabupaten Bondowoso, C. Pengambilan sampel kakao di Kabupaten Ponorogo, D. Pengambilan sampel pestisida di CV. Saprotan Utama Semarang, E. Preparasi contoh mutu formulasi pestisida, F. Preparasi contoh residu pestisida, G. Pengambilan contoh pestisida di Kabupaten Mojokerto, H. Pengambilan contoh kakao di Kabupaten Nganjuk, I. Pengambilan contoh tembakau di Kabupaten Bojonegoro. J. Preparasi contoh residu logam berat, K. Pengujian contoh residu pestisida pada alat UPLC/MSMS, L. Pengujian contoh logam berat pada alat AAS

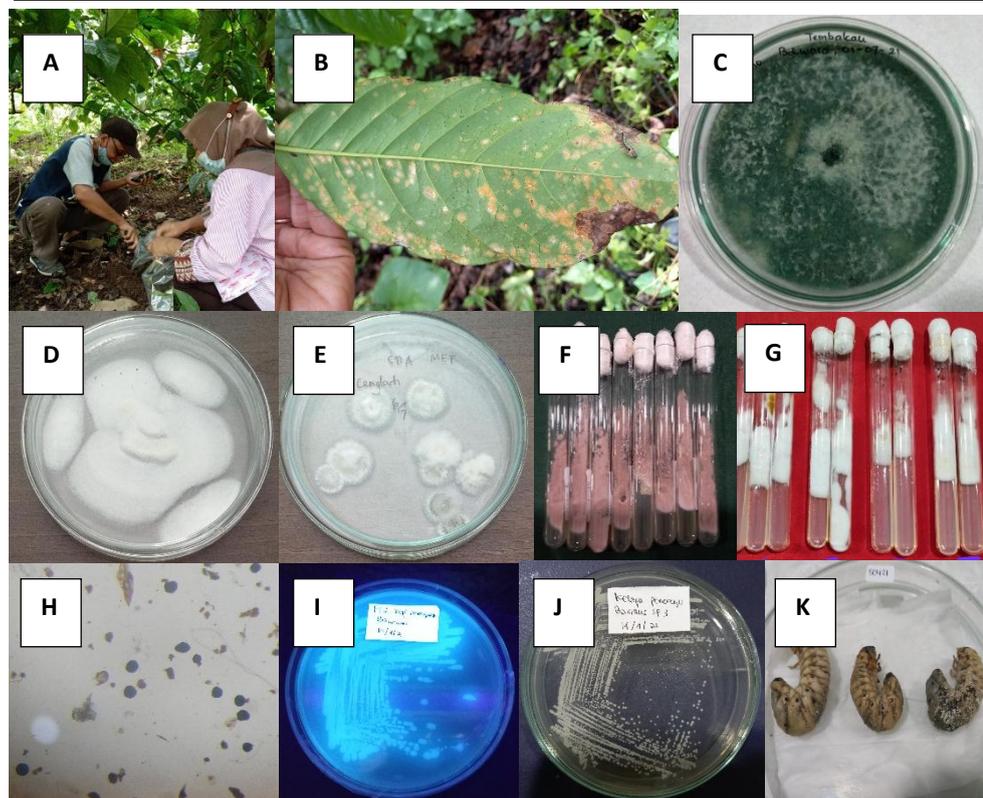
c. Layanan Penyediaan Isolat Agens Pengendali Hayati (APH)

Kegiatan layanan penyediaan isolat APH dalam pelaksanaannya mencakup dua kegiatan, yaitu eksplorasi APH dan pengembangan isolat unggul agens hayati perkebunan (SIBULAT). Kedua kegiatan

tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan eksplorasi APH bertujuan untuk mendapatkan APH yang potensial mengendalikan hama dan penyakit tanaman perkebunan, sedangkan kegiatan pengembangan isolat unggul agens pengendali hayati perkebunan (SIBULAT) bertujuan untuk menjaga kualitas APH melalui uji antagonisme ataupun uji patogenesitas terhadap OPT sasaran.

Tabel 5. layanan Layanan Penyediaan Isolat Agens Pengendali Hayati (APH) Tahun 2021

Kegiatan	Hasil	Penerima Manfaat
eksplorasi APH dan pengembangan isolat unggul agens hayati perkebunan (SIBULAT) terdiri dari <i>Trichoderma</i> sp., <i>Beauveria bassiana</i> , <i>Pseudomoas fluorescens</i> , <i>Coryne</i> sp., <i>Gliocladium</i> sp., <i>Bacillus</i> sp.	41 isolat	Instansi pemerintah dan petani





Gambar 3. Pelaksanaan kegiatan Operasional Laboratorium Proteksi, A. pengambilan sampel tanah pada kegiatan eksplorasi APH, B. pengambilan sampel daun kopi yang terinfeksi karat daun yang berasosiasi dengan jamur mikoparasit, C. Isolat murni jamur *Trichoderma* sp., D. Isolat murni jamur *Beauveria bassiana*, E. Isolat murni jamur *Metarhizium* sp., F. Isolat murni jamur *Paecylomyces* sp., G. Isolat murni jamur Mikoparasit *H. vastatrix*, H. Spora Mikoriza, I. Isolat murni bakteri *Pseudomonas* sp., J. Isolat murni bakteri *Bacillus* sp., K. Pemurnian jamur *Metarhizium* sp. terhadap larva *O. rhinoceros*, L. Pemurnian bakteri *Serratia* spp. terhadap nimfa *Helopeltis* sp., M. Pemurnian jamur *B. Bassiana* terhadap nimfa belalang, N. Pemurnian jamur *B. Bassiana* terhadap nimfa afid, O. Uji antagonisme jamur *Trichoderma* sp. terhadap patogen *S. rolfsii*, P. Uji antagonisme bakteri *Corynebacterium* sp. terhadap patogen *Xathomonas* sp., Q. Uji antagonisme bakteri *Bacillus* sp. terhadap *S. rolfsii*.

d. Layanan Penyediaan Formulasi APH dan Pupuk Hayati

Kegiatan pelayanan penyediaan formulasi APH dan pupuk hayati bertujuan untuk melakukan pelayanan penyediaan APH dan pupuk hayati bagi *stakeholder* terkait. Pelayanan yang diberikan berupa bantuan peningkatan SDM terhadap *stakeholder* maupun layanan produk APH yang telah dikembangkan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan baik di lingkungan kantor BBPPTP Surabaya maupun di lapang. Penerima manfaat adalah *stakeholder* terkait baik instansi pemerintah, mahasiswa, petani dan pihak swasta. Pelayanan yang diberikan mengalami hambatan karena terkendala PNBPN yang belum disahkan.

Tabel 6. Layanan Layanan Penyediaan Formulasi APH dan Pupuk Hayati Tahun 2021

Kegiatan	Hasil	Penerima Manfaat
Pengembangan nematoda entomopatogen, pupuk hayati mikoriza, parasitoid <i>Trichogramma</i> sp., dan <i>SINPV</i>	pupuk hayati mikoriza sebanyak 20kg, parasitoid <i>Trichogramma</i> sp., sebanyak 1.837 pias, <i>SINPV</i> menyediakan 1kg formulasi, NEP menyediakan 100 spon	keperluan uji dan mahasiswa



e. Layanan Identifikasi OPT dan Rekomendasi Pengelolaan OPT

Kegiatan Pelayanan Teknis Pengelolaan OPT Perkebunan (SINANDA) bertujuan untuk melakukan pelayanan teknis pengelolaan OPT Perkebunan bagi pelanggan yang membutuhkan, dengan didukung sumber daya manusia (SDM) Dokter Tanaman Yang kompeten. Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Januari hingga Desember 2021. Kegiatan dilaksanakan di wilayah kerja BBPPTP Surabaya. Selain melakukan pelayanan teknis, pada kegiatan ini juga direncanakan mengundang narasumber untuk melakukan pelatihan terkait pengelolaan OPT perkebunan sehingga dapat meningkatkan kompetensi Dokter Tanaman.

Realisasi pelaksanaan kegiatan hingga bulan Desember 2021, telah melakukan pelayanan teknis pengelolaan OPT Perkebunan baik di kantor BBPPTP Surabaya maupun dilapang. Layanan pada

kegiatan Sinanda adalah pemberian layanan Informasi OPT/konsultasi.

Konsultasi dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor BBPPTP Surabaya dan dapat juga dilakukan kunjungan lapang. Layanan yang dilakukan dengan datang langsung ke di BBPPTP Surabaya dapat berupa bimbingan mahasiswa magang/penelitian dan kunjungan oleh kelompok tani. Sementara untuk layanan informasi dan konsultasi di lapang (kelompok tani) meliputi layanan diagnosis OPT serta Layanan Anjuran Teknis/saran Pengendalian OPT dilapang.

Tabel 7. Layanan Identifikasi OPT dan Rekomendasi Pengelolaan OPT Tahun 2021

Kegiatan	Hasil	Penerima Manfaat
Pelayanan Teknis Pengelolaan OPT (SINANDA) adalah pemberian layanan Informasi OPT/konsultasi	bimbingan mahasiswa magang/penelitian dan kunjungan oleh kelompok tani dan layanan informasi dan konsultasi di lapang	38 orang petani



Gambar. Pelaksanaan kegiatan Pelayanan Teknis Pengelolaan OPT Perkebunan (SINANDA), A. Pemberian materi Teknik Pasca Panen Kopi di di Gapoktan Dolo Indah desa jugo, Kecamatan Mojo, kabupaten Kediri, B. Pemberian materi di Poktan Tunas Mekarsari Sejahtera, Desa Kalipucang, Kecamatan Tukur, Kabupaten Pasuruan, C. Pemberian materi Teknik Pengendalian OPT Tembakau di Kab. Blitar, D. Pemberian materi teknik pengendalian Tebu di Gapoktan Harapan Makmur Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kab Kediri, E. Praktek Pengendalian OPT Tebu di Kab Tulungagung, F. Pemberian materi Teknik Budidaya Kopi di Kabupaten Kediri

f. Layanan Penyediaan Data dan Informasi OPT

Data dan informasi merupakan suatu hal yang memegang peran penting di era digital seperti saat ini, baik sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan bagi pimpinan maupun sebagai bahan yang dapat disajikan sehingga menjadi sebuah layanan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas yang membutuhkan. Permasalahan utama terkait pengelolaan data dan informasi proteksi perkebunan selama ini adalah terkait keterlambatan pelaporan, sinkronisasi dan validasi data, serta penyajian dan analisis data OPT.

Aplikasi SIM OPT (Sistem Informasi OPT) Perkebunan online yang dikembangkan dan digunakan oleh BBPPTP Surabaya masih terdapat sejumlah kekurangan dan kelemahan sehingga tujuan utama dibuatnya aplikasi ini belum sepenuhnya tercapai, serta keberadaan aplikasi kurang begitu dirasakan oleh stakeholder dan masyarakat luas.

Menindaklanjuti permasalahan tersebut, pada tahun 2020 lalu BBPPTP Surabaya melakukan kegiatan penyempurnaan aplikasi SIM OPT perkebunan online berbasis teknologi geospasial dengan menitikberatkan perbaikan pada beberapa hal berikut :

1. Perbaikan sistem validasi data
2. Perbaikan visualisasi data
3. Perbaikan Sistem Manajemen Pengguna
4. Penambahan Fitur Peramalan Serangan OPT
5. Penambahan Fitur Data Monitoring Serangan OPT
6. Penambahan Fitur Teknik Pengendalian OPT
7. Penambahan Fitur Statistik Kunjungan dan Akses Data
8. Penambahan Form Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi pelaksanaan kegiatan hingga bulan Desember 2021, telah melakukan pelayanan informasi pengelolaan data OPT Perkebunan secara *online* melalui aplikasi SIMOPT ditunjukkan dengan adanya pengguna baru yang mendaftar pada aplikasi, telepon maupun secara *offline* dikantor dan pelayanan data dilapang. Pengguna jasa pada umumnya dari kalangan akademisi (mahasiswa/dosen) dan pegawai dari instansi pemerintah.

Tabel 8. Layanan Penyediaan Data dan Informasi OPT Tahun 2021

Kegiatan	Hasil	Penerima Manfaat
pelayanan informasi pengelolaan data OPT Perkebunan secara <i>online</i> melalui aplikasi SIMOPT (Sistem Informasi) OPT	12 pengguna baru, layanan melalui telepon maupun secara <i>offline</i> dikantor dan pelayanan data dilapang	kalangan akademisi (mahasiswa/dosen) dan pegawai dari instansi pemerintah



Gambar. Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data OPT Perkebunan, Proses rekapitulasi data serangan OPT di wilayah Kerja BBPPTP Surabaya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya

BBPPTP Surabaya memiliki beberapa layanan berupa : sistem bank untuk isolat (sibulat) yang menangani penyediaan isolat APH dari golongan jamur dan bakteri; layanan produk formulasi APH (ladufor) yang menangani penyediaan produk formulasi yaitu APH dari golongan nematoda entomopagoten, parasitoid *Trichogramma* sp., virus SINPV, dan pupuk hayati mikoriza; layanan pengujian mutu APH; layanan pengujian mutu dan residu pestisida; sistem layanan dokter tanaman (sinanda) yang menangani penyediaan jasa pemberian informasi OPT, identifikasi OPT, dan pemberian rekomendasi teknis pengendalian OPT di lapang; serta sistem informasi OPT perkebunan (SIMOPT) yang menangani penyediaan data serangan OPT perkebunan wilayah kerja BBPPTP Surabaya.

BBPPTP Surabaya melakukan survey kepuasan masyarakat (SKM) sesuai dengan PerMenPANRB Nomor 14 Tahun 2017. Hasil SKM ini selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan nilai SKM. Pada tahun 2021, target nilai SKM adalah 3 Skala Likert dan target ini terpenuhi 100% dengan mutu pelayanan B dan kinerja unit pelayanan baik.

Tabel 9. Analisis Capaian Indikator Kinerja Aktivitas

	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya	<h2>ANALISA DATA</h2>	No. Form : FR-PM-11.02 Revisi : 01 Tanggal : 28 Agst 2018 Halaman : 1/1							
	<p>Analisa Data Sasaran Mutu / Data Evaluasi Suplier / Data Lainnya..... : Analisa Data dan Evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap BBPPTP Surabaya</p> <p>Target Bulan : - Hasil : 88.33</p> <p>: Januari - Desember 2021</p>									
No / Tgl		DATA								
1. Penilaian Persepsi	Pelanggan	NILAI PERSEPSI								
		U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
		1	4	4	4	4	4	4	4	4
		2	3	3	3	3	3	3	3	3
		3	4	4	4	3	4	4	4	4
		4	3	4	3	3	3	4	3	4
		5	4	3	3	3	3	4	4	3
		6	3	4	4	3	3	3	4	3
		7	4	4	4	3	4	4	4	4
		8	3	3	3	3	3	3	3	3
		9	3	3	4	3	3	3	3	2
		10	4	4	4	3	4	4	3	4
		11	3	4	3	3	3	3	4	3
		12	3	3	3	3	4	4	4	4
		13	3	3	3	3	3	4	4	3
		14	3	3	3	3	3	4	4	3
		15	3	3	3	3	3	3	3	3
		16	4	4	4	4	4	4	4	4
		17	3	3	3	3	3	3	3	3
		18	4	3	4	3	4	4	3	3
		19	3	4	3	3	3	3	3	3
		20	4	4	4	3	4	4	4	4
		21	4	3	3	3	4	4	4	4
		22	3	4	3	3	3	3	3	3
		23	3	4	3	3	3	3	3	3
		24	4	4	4	3	3	4	3	3
		25	4	4	4	4	4	4	4	4
		26	4	4	4	3	4	4	4	4
		27	4	4	4	3	4	4	4	4
		28	4	3	3	4	4	4	4	3
		29	4	4	3	3	4	4	4	3
		30	4	3	3	3	4	4	4	4
		31	4	3	3	4	4	4	4	3
		32	4	4	4	4	4	4	4	4
		33	4	4	4	3	4	4	4	4
		34	4	4	4	3	4	4	4	4
		35	3	4	3	3	3	4	4	4
		36	4	3	3	3	4	4	4	4
		37	4	3	3	4	4	4	4	3
		38	3	4	4	3	3	4	4	4
		39	4	4	4	3	4	4	4	3
		40	4	4	4	3	3	3	4	4
		41	4	4	4	3	4	4	4	3
		42	4	4	4	3	3	4	4	4
		43	4	4	4	3	4	4	3	3
		44	3	4	4	3	3	4	4	4
		45	4	4	4	3	4	4	4	3
		46	4	4	4	3	4	4	4	4
		47	4	4	3	4	4	4	4	4
		48	3	3	3	3	3	3	3	3
		49	3	3	3	3	3	4	3	3
		50	3	3	3	3	3	3	3	3
		51	4	4	4	3	4	4	4	3
		52	3	3	4	3	3	4	4	4
53	4	4	4	3	4	4	4	3		

54	4	4	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4
58	3	3	3	4	3	3	3	3	4
59	4	4	4	3	3	3	4	4	4
60	4	4	3	3	4	3	4	4	4
61	4	4	4	3	4	3	3	4	4
62	3	3	3	4	3	4	4	4	4
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	3	3	3	4	3	4	4	4	4
65	3	3	3	4	4	4	3	4	4
66	3	3	3	4	3	3	4	3	3
67	3	3	2	4	3	3	3	3	3
68	3	3	3	3	3	3	3	3	4
69	3	3	3	3	4	3	3	3	4
70	4	4	3	3	4	3	3	4	4
71	3	3	3	3	3	3	3	3	4
72	3	4	4	3	3	3	4	4	4
73	3	3	3	3	3	3	3	2	4
74	3	4	3	3	4	4	4	3	4
75	3	4	3	3	4	4	4	3	4
76	3	3	3	3	3	3	3	3	4
77	3	3	3	3	3	3	3	3	4
78	4	3	3	3	3	3	4	4	4
79	3	3	3	3	3	3	3	3	4
80	3	3	3	3	3	3	3	3	4
81	3	3	3	3	3	3	3	3	4
82	3	3	3	3	3	3	3	3	4
83	3	3	3	3	3	3	4	3	4
84	4	4	4	3	4	4	4	4	4
85	3	3	3	3	3	3	3	3	4
86	3	3	3	3	3	3	3	3	4
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4
94	4	4	4	4	4	4	4	4	4
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4
98	4	4	4	4	4	4	4	4	4
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4
105	3	3	3	3	3	3	4	3	4
106	3	3	3	3	4	3	3	3	4
107	3	3	3	3	3	3	3	3	4
108	3	3	3	3	3	3	3	3	4
109	3	3	3	3	3	3	3	3	4
110	3	4	3	3	3	3	3	4	3
111	4	3	3	3	4	3	3	3	4
112	4	4	4	3	3	4	4	4	4
113	3	3	3	4	4	3	4	3	4
114	3	3	3	3	3	3	3	3	4
115	3	3	3	3	4	4	4	4	4
116	3	3	3	3	3	3	3	3	4
117	3	3	3	3	3	3	3	3	4
118	3	3	3	3	3	3	3	4	4
119	3	3	3	3	3	3	3	4	4
120	4	4	4	4	3	3	4	4	4
121	4	4	4	4	4	4	4	4	4
122	3	3	3	3	3	3	3	3	3
123	4	4	4	2	4	4	4	3	4
124	4	4	4	3	4	4	4	4	4
125	4	4	4	2	4	3	4	3	4
Jumlah Pelanggan									125

		Jumlah Nilai Persepsi	443.00	446.00	435.00	413.00	443.00	449.00	455.00	439.00	492.00		
		Nilai Unsur	48.73	49.06	47.85	45.43	48.73	49.39	50.05	48.29	54.12		
		Nilai SKM										441.65	
		Rata-rata Nilai SKM										3.53	
		Interpretasi SKM										11041.25	
		Rata-rata Interpretasi SKM										88.33	
2.	Jumlah Nilai Persepsi												
		No.	UNSUR PELAYANAN								Jumlah Nilai Persepsi		
		U1	Kesesuaian Persyaratan								443.00		
		U2	Kemudahan Prosedur								446.00		
		U3	Kecepatan waktu								435.00		
		U4	Kewajaran tarif								413.00		
		U5	Kesesuaian Produk								443.00		
		U6	Kompetensi								449.00		
		U7	Perilaku petugas								455.00		
		U8	Kualitas sarana dan prasarana								439.00		
		U9	Penanganan Pengaduan								492.00		
3.	Nilai Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan :											
		A (Sangat Baik)	:	88.31	-	100.00							
		B (Baik)	:	76.61	-	88.30							
		C (Kurang Baik)	:	65.00	-	76.60							
		D (Tidak Baik)	:	25.00	-	64.99							
						24.99							
Perhitungan :													
	Rata-rata Interpretasi SKM	=	$\frac{\sum (U_{1-9})}{\sum \text{respon}}$	X	25								
		=	88.33										
		=	Sangat Baik										

ASPEK UMUM

SUB BAGIAN TATA USAHA

Sub Bagian Tata Usaha merupakan unit organisasi lingkup BBPPTP Surabaya yang mempunyai fungsi dalam memfasilitasi dan memberikan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan sub bagian tata usaha dalam kurun waktu 2020 – 2024 meliputi : Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, evaluasi, pelaporan serta urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik negara.

A. POTENSI DAN TANTANGAN

Sebagai salah satu institusi pelaksana teknis Ditjen Perkebunan, maka BBPPTP Surabaya harus dapat merumuskan kebijakan, menyusun strategi, program serta kegiatan yang dapat mengoptimalkan potensi dan menjawab tantangan dalam mendukung pembangunan perkebunan dalam 5 tahun ke depan

B. POTENSI ORGANISASI

1. Tersedianya norma, standar, prosedur, kriteria, pedoman umum, pedoman teknis, regulasi dan kebijakan Pelaksanaan pembangunan perkebunan mempunyai landasan hukum yang kuat berupa UU No. 12 tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Perundang-undangan turunannya, UU no 39 tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Perundang-undangan turunannya yang didukung dengan Peraturan Presiden No. 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian. Landasan hukum tersebut merupakan salah satu potensi yang
2. bisa digali dalam pengembangan perkebunan secara menyeluruh dan terpadu agar kegiatan pembangunan perkebunan lebih praktis

dan mudah dilaksanakan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku maka perlu didukung dengan pedoman teknis seperti pedoman perencanaan program dan anggaran, pedoman SPI, pedoman teknis (SOP) pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih, pengujian mutu APH, pengujian mutu dan residu pestisida, SNI – SNI komoditas perkebunan seperti tebu, kopi, kakao, Sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan Sistem manajemen mutu laboratorium ISO 17025 : 2017, dan pedoman lainnya yang masih dapat diperluas dan berpotensi untuk lebih didayagunakan. BBPPTP Surabaya sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perkebunan mendukung penyusunan norma dan standar seperti pedoman teknis sertifikasi dan pengujian mutu benih, pedoman pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan beberapa pedoman teknis yang lain.

3. Sistem Informasi Manajemen dan Teknis Lainnya

Semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan akses data dan informasi sangat mudah dilaksanakan dan cepat tersebar kepada masyarakat yang membutuhkan. Perangkat teknologi informatika yang telah dimiliki oleh BBPPTP Surabaya adalah : website, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Akuntansi Instansi (SAI), Sistem Monitoring dan Evaluasi (Simonev), *Geographic Information System* (GIS), e-SIANI, SIPOTKENDIL, SIRATU dan Sistem Informasi OPT (SIM-OPT). Selain informasi yang disajikan dalam bentuk softcopy, informasi juga disajikan dalam bentuk hardcopy/ fisik seperti buku pedoman teknis, leaflet, banner dan poster.

4. Sebagai amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap Instansi Pemerintah perlu menrapkan suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan atau penguran, pengumpulan data,

pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP ini memuat : 1) perencanaan kinerja (Renstra, Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan); 2) pengukuran kinerja (Penetapan indikator kinerja Utama dan indikator kinerja kegiatan ; 3) pengelolaan data kinerja (baseline data, perbandingan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target / sasaran dalam Renstra); 4) Pelaporan kinerja (Laporan Kinerja (LAKIN interim dan tahunan) ; 5) review dan evaluasi kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

5. Ketersediaan alokasi anggaran

Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan program pembangunan perkebunan melalui optimasi dan dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. Anggaran terbesar lainnya digunakan untuk menjalankan program penerapan pemerintahan yang baik seperti gaji pegawai, operasional perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis maupun administrasi dan keuangan

6. Dukungan terhadap penyediaan benih unggul bermutu

Benih merupakan salah satu input dasar dalam kegiatan produksi tanaman. Seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan efisiensi dan daya saing usaha perkebunan maka semakin meningkat pula kebutuhan akan benih unggul dan sarana produksi bermutu.

7. Penggunaan benih yang tidak memenuhi syarat dapat menurunkan hasil produksi, hal ini ditunjukkan oleh kondisi tanaman yang buruk karena rendahnya mutu fisik, genetik, fisiologis dan meningkatnya kerentanan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Proses untuk mendapatkan benih unggul, bermutu dan bersertifikat membutuhkan sinergitas antara

ketersediaan produksi benih dengan kebutuhan dilapangan yang dikemas dalam manajemen sistem perbenihan. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya melalui

8. kegiatan sertifikasi, pengujian dan pengawasan mutu benih memberikan jaminan kualitas sumber benih khususnya di 16 provinsi yang merupakan wilayah kerja BBPPTP Surabaya meliputi Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Dengan didukung oleh pelayanan organisasi yang berkualitas melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan ISO 17025 : 2017 sebagai laboratorium penguji maka fungsi pelayanan teknis kepada masyarakat lebih optimal dan menjadi rujukan UPTD Provinsi.
9. Perkembangan inovasi dan lptek perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
Perkembangan lptek dapat dimanfaatkan untuk pengembangan metode pengujian mutu benih, daya simpan benih terkait sertifikasi dan pelabelan serta penggunaan bio-teknologi dan nano-teknologi dalam analisis DNA dan kesehatan benih. Teknologi pemuliaan tanaman juga telah dihasilkan melalui rekayasa genetika dalam rangka mendukung pengadaan varietas unggul guna menciptakan komoditas perkebunan berdaya saing tinggi
10. Dukungan rakitan teknologi proteksi spesifik komoditas perkebunan
Inovasi teknologi pengendalian OPT tanaman perkebunan yang dilaksanakan BBPPTP Surabaya melalui : 1) Rakitan teknologi proteksi OPT perkebunan ; 2) Pengembangan teknologi agensia

hayati; 3) Rakitan teknologi antisipasi dampak perubahan iklim terhadap tanaman perkebunan seperti kekeringan, banjir dan lahan kritis ; 4) Eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan; 5) Optimasi pemanfaatan pestisida nabati (biopestisida). Formulasi agens hayati dan pupuk hayati yang ramah lingkungan dan dapat memperbaiki kesuburan tanah yang terdegradasi. Sistem keamanan pangan menjadi menjadi isu internasional pada produk-produk perkebunan khususnya yang menyangkut persyaratan kandungan bahan berbahaya seperti residu pestisida, logam berat dan penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan.

11. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan aset organisasi yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Pengembangan SDM harus memperhatikan beberapa hal diantaranya :

- pendidikan dan kemampuan / skills ;
- adopsi inovasi dan teknologi;
- ketersediaan sarana kerja dan lingkungan kerja yang memadai serta
- aksesibilitas, konektivitas dan minat.

BBPPTP Surabaya dengan jumlah Sarjana S1 sebanyak 69 orang, S2 sebanyak 36 orang diharapkan mampu menjalankan fungsi pelayanan melalui optimasi dan dukungan pengujian, pengawasan mutu benih dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan yang berkualitas.

12. Reformasi Birokrasi

Amanat UU No. 17 Tahun 2007 terkait dengan pembangunan aparatur negara melalui reformasi birokrasi dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan reformasi birokrasi yang

digariskan pemerintah diharapkan akan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Sasaran ideal yang ingin dicapai adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. BBPPTP Surabaya sebagai unit pelayanan publik diharapkan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas, fokus, efektif, efisien, profesional dan akuntabel kepada pengguna layanan.

6. TANTANGAN ORGANISASI

Berikut ini dapat diklasifikasikan tantangan yang akan dihadapi dalam pembangunan perkebunan ke depan Ketersediaan benih (Implementasi Optimalisasi Sertifikasi dan Pengujian Mutu benih)

Untuk menjamin mutu benih maka produksi benih bina harus melalui sertifikasi hal ini sesuai dengan Permentan nomor 50 tahun 2016 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan. Masalah perbenihan lainnya adalah adanya keterbatasan sumber benih yang dapat menghambat pemenuhan benih bermutu dan bersertifikat.

1. Perubahan iklim akibat pemanasan global dan peningkatan serangan OPT Perubahan iklim berpotensi terhadap munculnya OPT yang populasinya sulit diproyeksi dan dapat menjadikan tanaman perkebunan semakin rentan terhadap serang OPT tersebut. Hal ini karena perubahan iklim mengganggu keseimbangan antara populasi serangga, hama dan musuh alaminya serta tanaman inang.

2. Inovasi rakitan teknologi spesifik lokasi

Rakitan teknologi spesifik lokasi merupakan kombinasi beberapa teknologi pengendalian OPT yang sudah dikaji-terapkan pada lokasi tertentu. Wilayah kerja bidang proteksi yang luas meliputi 8 Propinsi menyebabkan kajian rakitan teknologi tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah kerja. Hal ini dikarenakan masing-masing propinsi memiliki karakteristik yang berbeda sehingga keadaan OPT juga menyesuaikan keadaan lingkungan. Perlu adanya kajian lebih lanjut pada tiap propinsi mengenai teknologi yang spesifik dan sesuai dengan lokasi setempat.

3. Integrated Farming System

Integrated Farming System melalui pelaksanaan inovasi teknologi yang berbasis sistem pertanian terintegrasi baik dengan ternak maupun dengan tanaman pangan/ perkebunan lainnya dan integrasi dengan cabang- cabang usaha tani lainnya seperti perikanan, dan lain - lain serta mengedepankan tipe sumber daya lahan (beriklim basah, beriklim kering dan lain-lain). Sistem pertanian yang diharapkan bukan sebatas diversifikasi, namun integrated farming system.

2.3. ARAH KEBIJAKAN

1. SASARAN DAN STRATEGI TAHUN 2020– 2024

1.1. Kerangka Berpikir Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2020 - 2024

Sebagai dasar dalam mengembangkan perkebunan ke depan, BBPPTP Surabaya merumuskan kerangka berfikir yang berbasis perencanaan. Kerangka berfikir ini memuat analisis perencanaan dalam memproyeksi target sasaran strategis utama dan pendukung pembangunan perkebunan kedepan yang meliputi sertifikasi dan pengujian mutu benih, rakitan teknologi proteksi mendukung penyediaan benih yang bermutu dan meningkatkan produksi dan produktivitas 16 komoditas unggulan perkebunan. Selain itu juga peningkatan kualitas sumber daya insani perkebunan dan pengembangan jejaring kerjasama laboratorium dalam implementasi sistem manajemen mutu pengujian laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan.

1.2. Arah Kebijakan BBPPTP Surabaya

Dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan Nasional 2020 – 2024, kebijakan Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024 bahwa Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan dengan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a) Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b) Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
- c) Menjaga keberlanjutan sumberdaya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- d) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pertanian (SDM),

- e) Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Strategi Direktorat Jenderal Perkebunan dalam mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2024, digambarkan melalui kerangka Strategis bahwa untuk meningkatkan produk perkebunan nasional yang bernilai tambah dan berdaya saing perlu didukung oleh 4 pilar yaitu :

1. Benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan
2. Efisiensi budidaya tanaman perkebunan pada komoditas tanaman semusim - rempah dan tanaman tahunan - penyegar
3. Pengendalian OPT dan dampak perubahan iklim
4. Peningkatan mutu, keamanan serta pengolahan dan pemasaran produk hasil perkebunan.

Maka BBPPTP Surabaya menetapkan arah kebijakan tahun 2020 – 2024 sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan pembangunan perkebunan 5 tahun mendatang ditetapkan menjadi arah kebijakan umum dan arah kebijakan khusus.

Arah kebijakan umum BBPPTP Surabaya Tahun 2020 - 2024 adalah mendukung pengujian, pengawasan mutu benih dan mutu APH serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan untuk mendukung kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. Implementasi dukungan BBPPTP Surabaya adalah :

1. sertifikasi dan pengujian mutu benih dan mutu APH;
2. Pengembangan teknologi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang ramah lingkungan ;dan
3. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik. Sedangkan arah kebijakan adalah arah kebijakan pembangunan perkebunan tahun 2020 – 2024 yang

ditetapkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan tahun 2020 – 2024 yang diantaranya meliputi :

1.3. SASARAN STRATEGIS UTAMA BBPPTP SURABAYA TAHUN 2020 – 2024

a. Pengelolaan benih tanaman perkebunan berkualitas dan berkelanjutan dalam mendukung produktivitas tanaman

melalui sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pembangunan nursery tanaman perkebunan untuk beberapa komoditas perkebunan diantaranya tebu, kopi, kakao, kelapa dan jambu mete.

b. Efisiensi budidaya dan produksi tanaman tahunan dan penyegar dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor produk hasil perkebunan

Melalui melalui penerapan *best practice* budidaya tanaman perkebunan yang selaras dengan *Good Agricultural Practice* (GAP). Kegiatan peningkatan efisiensi budidaya dan produksi tanaman semusim –rempah dan tahunan - penyegar dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri serta ekspor hasil produksi tanaman perkebunan.

c. Optimasi perlindungan tanaman perkebunan dari OPT serta antisipasi risiko DPI

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dimana perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/DPI secara optimal dapat dilakukan guna menurunkan risiko gagal panen karena kematian tanaman akibat OPT/DPI tersebut. Penanggulangan terhadap serangan OPT dilakukan melalui tindakan pencegahan (preventif) dan tindakan pengendalian (kuratif), sedangkan upaya

penanggulangan terhadap serangan DPI dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi terhadap DPI.

d. Implementasi reformasi birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui

1. Peningkatan kualitas sumber daya insani perkebunan
2. Peningkatan jejaring kerjasama laboratorium di wilayah kerja BBPPTP Surabaya
3. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik dengan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, integritas/ komitmen kejujuran, konsistensi dan bebas KKN di lingkungan unit kerja BBPPTP Surabaya

Berikut ini ditetapkan arah kebijakan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan tahun 2020 – 2024.

- a) Pengembangan dan Penguatan sertifikasi pengujian mutu benih berstandart Internasional (ISO / IEC)

Arah kebijakan yang dimaksudkan adalah untuk memfokuskan implementasi sertifikasi dan pengujian mutu benih dalam mengoptimalkan penyediaan benih unggul bermutu sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No 50/ Permentan/09/ 2015 tentang produksi, sertifikasi dan pengawasan tanaman perkebunan. Sertifikasi dan pengujian mutu benih difokuskan pada komoditas unggulan perkebunan antara lain : tebu, kelapa, kakao, kopi, teh dan cengkeh. Selain itu juga untuk komoditas lain sesuai potensi lokal seperti : nilam, kemiri sunan, kapas, jambu mete dan tembakau. Pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan ISO 17025 : 2017

secara konsisten sehingga akurasi hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan dukungan sertifikasi dan pengujian mutu benih untuk komoditas yang berorientasi nilai tambah dan komoditas andalan serta potensial/prospektif ekspor dilakukan antara lain pada komoditas : Kelapa, kopi, kakao, teh dan tembakau. Selain itu setiap tahun dilakukan upaya monitoring dan evaluasi kelayakan sumber benih pada komoditas Kopi, kakao dan teh.

Aspek – aspek kebijakan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung peningkatan komoditas perkebunan bernilai tambah dan berorientasi ekspor dalam mewujudkan daya saing sub sektor perkebunan

Tabel 10. Aspek- Aspek Kebijakan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024

No	Aspek – Aspek Kebijakan
1	Mendukung penyediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat pada komoditas kelapa, tebu, kopi dan kakao yang selama ini berkontribusi dalam penerimaan negara dari ekspor melalui kegiatan
2	Mendukung penyediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat pada komoditas the, jambu mete, tembakau yang memiliki prospek atau potensi melalui
3	Monitoring dan evaluasi kebun sumber bahan tanaman pada komoditas : kelapa, tebu, kopi dan kakao secara

- b) Penguatan pengujian mutu Agens Pengendali Hayati (APH), mutu pestisida dan residu pestisida sesuai SNI dan ISO 17025:2017

Arah kebijakan yang dimaksudkan adalah untuk memfokuskan implementasi pengujian mutu APH dalam mengoptimalkan penyediaan APH bermutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973 tentang : Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida dan Peraturan Menteri Pertanian 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran

Pestisida. Pengujian mutu APH difokuskan APH sesuai SNI 8027.1: 2014, 8027.2:2014, dan 8027.3:2014 tentang Agens Pengendali Hayati *Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae*, dan *Trichoderma* spp. Selain itu mengoptimalkan pengujian mutu pestisida yang beredar dan residu pestisida pada hasil perkebunan agar memenuhi Batas Maksimal Residu (BMR) pestisida sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian No. 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimal Residu Pestisida pada Hasil Pertanian. Pelaksanaan pengujian mutu APH, mutu pestisida dan residu pestisida menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium ISO 17025 : 2017 secara konsisten sehingga akurasi hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 11. Arah kebijakan Pelaksanaan pengujian mutu APH

No	Aspek – Aspek Kebijakan
1	Mendukung penyediaan APH dan pestisida bermutu
2	Monitoring dan evaluasi APH dan pestisida yang beredar sesuai standar, serta residu pestisida pada

- c) Peningkatan Penyediaan inovasi teknologi perlindungan perkebunan pada komoditas perkebunan strategis yang ramah lingkungan

Arah kebijakan yang dimaksudkan adalah mengoptimalkan validitas data serangan OPT, ketepatan identifikasi OPT, pengujian, penyediaan dan pemanfaatan agens pengendali hayati (APH), pupuk hayati, pestisida nabati dan feromon dalam pengendalian OPT yang ramah lingkungan guna meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas strategis perkebunan. Pengujian efikasi pestisida pada komoditas perkebunan dilakukan untuk menjamin

penggunaan pestisida secara efisien dan efektif guna meminimalisir dampak negatif pestisida.

Tabel 12. Arah kebijakan Peningkatan Penyediaan inovasi teknologi

No	Aspek – Aspek Kebijakan
1	Mendukung penyediaan data serangan OPT komoditas perkebunan strategis yang valid, pestisida
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kualitas mutu APH, mutu pestisida dan residu pestisida hasil perkebunan yang beredar di Wilayah kerja BBPPTP
3	Mendukung penyediaan inovasi teknologi proteksi OPT perkebunan ramah lingkungan
4	Melaksanakan pengujian efikasi pestisida
5	Menoptimalkan Sistem Informasi Manajemen OPT terintegrasi sebagai sarana peringatan dini untuk

Aspek – aspek kebijakan BBPPTP Surabaya tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung pemenuhan pengelolaan benih perkebunan yang berkualitas dan berkelanjutan antara lain :

Tabel 13. mendukung pemenuhan pengelolaan benih perkebunan

No	Aspek – Aspek Kebijakan
1	Mendukung penyediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat pada komoditas kelapa, kemiri sunan dan jarak pagar melalui kegiatan sertifikasi dan
2	Melaksanakan monitoring dan evaluasi kelayakan kebun sumber bahan tanaman (kebun induk dan
4	Inventarisasi, koordinasi, pengawalan dan pendampingan proses pelepasan varietas klon – klon
5	Pembangunan dan pengelolaan nursery komoditas tebu, kopi, kakao, kelapa dan jambu mete dalam mendukung penyediaan benih bermutu dan

- d) Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan Reformasi Birokrasi sebagai Dasar Pelayanan Prima

Arah kebijakan ini dimaksudkan untuk membangun aparatur negara yang berkualitas, profesional dan berdaya saing melalui sistem tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dari KKN, transparan dan akuntabel. Dalam UU nomor 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005 – 2025 menyebutkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan

mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Isu yang berkembang dalam kaitan dengan reformasi birokrasi adalah modernisasi manajemen kepegawaian, restrukturisasi dan perubahan manajemen organisasi, rekayasa proses administrasi pemerintahan, anggaran berbasis kinerja, proses perencanaan partisipatif, pelayanan prima dan tata hubungan birokrasi antara pemerintah dan masyarakat.

Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik ditandai dengan :

- a. terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintah
 - b. Meningkatnya akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah
 - c. Makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung manajemen birokrasi secara modern
- Aspek –aspek kebijakan BBPPTP Surabaya tahun 2015-2019 dalam rangka implementasi reformasi birokrasi adalah :

Tabel 14. Aspek kebijakan implementasi reformasi birokrasi

No	Aspek – Aspek Kebijakan
1	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja BBPPTP Surabaya melalui aspek perencanaan kinerja (penyusunan Renstra, penetapan kinerja, dan rencana kinerja tahunan) ; pengukuran kinerja (penetapan IKU dan IKK); pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja (penyusunan laporan kinerja (LAKIP), evaluasi kinerja (reviu terhadap kinerja leh APIP) dan capaian kinerja (realisasi kinerja dan keuangan)
2	Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat /publik secara konsisten dan berkelanjutan melalui pendekatan 1 pintu dan 1 atap dalam bidang : sertifikasi dan pengujian mutu benih, proteksi tanaman perkebunan, analisis mutu dan residu pestisida, data serangan OPT, rekomendasi pengendalian OPT, klinik tanaman. Selain itu juga mendorong inovasi pelayanan publik. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik
3	Meningkatkan inovasi pelayanan public dengan memanfaatkan (big data; IOT dsb)

4	Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN dengan menerapkan sistem keterbukaan dan akuntabilitas informasi publik (semangat WBK dan WBBM)
5	Pembinaan pegawai dalam penerapan prinsip tatanan pengelolaan manajemen keterbukaan, akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi

1.4. SASARAN STRATEGIS BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) SURABAYA

Strategi umum dirumuskan BBPPTP Surabaya dalam rangka mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan 2020 – 2024 yaitu dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. Sedangkan strategi khusus adalah strategi dalam rangka mendukung pencapaian 6 kegiatan strategis Ditjen. Perkebunan tahun 2020 – 2024.

A. STRATEGI UMUM

Berikut ini adalah strategi umum BBPPTP Surabaya untuk 5 tahun mendatang :

- 1) Mendukung strategi pengembangan komoditas perkebunan strategis Strategi ini mencakup :
 - a. Mengoptimalkan dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan bersertifikat melalui sertifikasi benih, pengujian mutu benih dan system manajemen mutu pada komoditas perkebunan
 - b. Melaksanakan pembangunan nursery dan manajemen produksi pada komoditas unggulan perkebunan seperti tebu, kelapa, kakao, kopi, jambu mete untuk pemenuhan kebutuhan benih perkebunan yang tepat waktu, lokasi, mutu dan harga.
 - c. Melakukan inventarisasi klon – klon unggul lokal di wilayah

kerja BBPPTP Surabaya

- d. Pengawasan dan pendampingan pelepasan varietas unggul dan varietas unggul local dalam upaya pemenuhan kebutuhan unggul perkebunan
 - e. Mengoptimalkan dukungan perlindungan perkebunan dalam mengatasi gangguan OPT perkebunan melalui inovasi teknologi yang ramah lingkungan
 - f. Mengoptimalkan dukungan perlindungan perkebunan dalam mengatasi gangguan OPT perkebunan melalui pengujian efikasi pestisida untuk menjamin penggunaan pestisida secara efisien dan efektif guna meminimalisir dampak negatif pestisida.
 - g. Mengoptimalkan dukungan penanganan gangguan usaha perkebunan seperti dampak perubahan iklim (kekeringan dan banjir)
 - h. Menyusun petunjuk teknis dengan substansi isi menjelaskan tentang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
- 2) Mendukung strategi pengembangan sumber daya manusia
- a. Mendorong peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengembangan kompetensi sumber daya insani melalui pendidikan, magang, pelatihan, dan penelitian
 - b. Peningkatan kegiatan bimbingan teknis bagi petugas perkebunan daerah di wilayah kerja BBPPTP Surabaya
 - c. Peningkatan kualitas, moral, disiplin dan etos kerja aparatur pemerintah
 - d. Pemantapan aparatur pemerintah yang produktif, efisien dan berakhlak mulia.
- 3) Mendukung strategi perlindungan, pelestarian, pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup
- a. Pengembangan dan penyedia pupuk hayati, pestisida nabati, feromon dan agens pengendali hayati (APH)
 - b. Melakukan kajian dan inovasi paket teknologi proteksi

- tanaman perkebunan yang ramah lingkungan
- c. Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah
 - d. Mengoptimalkan pengawasan peredaran APH dan pestisida, serta residu pestisida pada komoditas perkebunan
- 4) Mendukung strategi peningkatan upaya adaptasi, mitigasi, bencana, perubahan iklim dan perlindungan perkebunan
- a. Inventarisasi, koordinasi, pengawalan dan pendampingan proses pelepasan varietas klon – klon unggul yang spesifik lokasi, adaptif terhadap perubahan iklim dan gangguan OPT
 - b. Optimalisasi pengembangan dan penyediaan agens pengendali hayati, musuh alami dan feromon dalam pengendalian OPT
 - c. Melakukan inovasi dan kajian aplikatif terkait dampak perubahan iklim terhadap benih dan perkembangan OPT tanaman perkebunan
 - d. Memfasilitasi penyediaan data dan informasi terkait sistem peringatan dini gangguan OPT dan gangguan usaha perkebunan
- 5) Mendukung Strategi penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan implementasi reformasi birokrasi sebagai dasar pelayanan prima
- a. Membina pegawai dalam penerapan prinsip tatanan pengelolaan manajemen keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi
 - b. Mendorong optimalisasi sistem keterbukaan dan akuntabilitas informasi publik
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan website data dan informasi yang lengkap, akurat dan terpercaya.

- d. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penerapan reward and punishment kepada pegawai
- e. Menerapkan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan organisasi melalui aspek perencanaan kinerja (penyusunan Renstra, penetapan kinerja, dan rencana kinerja tahunan) ; pengukuran kinerja (penetapan IKU dan IKK); pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja (penyusunan laporan kinerja (LAKIP), evaluasi kinerja (revisi terhadap kinerja oleh APIP) dan capaian kinerja (realisasi kinerja dan keuangan).
- f. Menerapkan sistem kinerja pegawai dan SOP yang jelas mengenai tugas dan fungsi pegawai dalam menjalankan tugas kegiatan sehari-hari
- g. Mendukung penataan dan pengawasan akuntabilitas kinerja secara berkala oleh atasan dan auditor.

B. STRATEGI KHUSUS

Berikut ini adalah strategi khusus BBPPTP Surabaya 5 tahun mendatang

1. STRATEGI Mendukung Pengelolaan Benih Tanaman Perkebunan Berkualitas dan Berkelanjutan dalam Mendukung Produktivitas Tanaman

- a. Pelaksanaan layanan sertifikasi dan pengujian mutu benih telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 dan ISO 17025 : 2017 secara konsisten sehingga tepat waktu dan akurasi hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis terkait sertifikasi dan pengujian mutu benih dan system manajemen mutu bagi petugas UPTD terkait komoditas perkebunan.
- c. Penyusunan standar, norma dan pedoman terkait komoditas perkebunan

- d. Menjalin peningkatan *link and match* dengan lembaga riset guna meningkatkan teknik produksi dan pengelolaan benih tanaman perkebunan.
- e. Melaksanakan penilaian dan evaluasi unjuk kerja laboratorium pengujian mutu benih di wilayah kerja BBPPTP Surabaya melalui pelaksanaan uji provisiensi sesuai ISO 17043 : 2010

2. STRATEGI Mendukung OPTIMASI Perlindungan Tanaman Perkebunan dari OPT serta Antisipasi Risiko DPI

- a. Mengoptimalkan kajian dan inovasi paket teknologi proteksi pada komoditas perkebunan yang ramah lingkungan
- b. Menjalin peningkatan *link and match* dengan lembaga riset dalam hal pengendalian OPT pada komoditas perkebunan
- c. Mendukung penyediaan APH bermutu untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan
- d. Mengoptimalkan pengujian mutu dan efikasi pestisida pada komoditas perkebunan

3. STRATEGI Mendukung Efisiensi Budidaya dan Produksi Tanaman Semusim dan Rempah serta Tanaman Tahunan dan Penyegar dalam Memenuhi Kebutuhan dalam Negeri maupun Ekspor Produk Hasil Perkebunan

- a. Inventarisasi, koordinasi, pengawalan dan pendampingan proses pelepasan varietas klon – klon unggul lokal yang berpotensi menjadi komoditas unggulan lokal
- b. Memastikan penyediaan benih unggul bermutu komoditas perkebunan berorientasi ekspor untuk kepentingan intensifikasi dan peremajaan melalui monitoring dan evaluasi kelayakan kebun sumber bahan tanaman (kebun induk dan entres)
- c. Mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan ekspor perkebunan melalui kegiatan pengendalian OPT yang ramah

lingkungan

- d. Mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan ekspor perkebunan melalui kegiatan pengujian residu pestisida pada komoditas perkebunan sesuai standar Nasional dan Internasional (BMR SNI dan Permentan serta *MRL's European Union*).

4. STRATEGI Mendukung IMPLEMENTASI REFORMASI

BIROKRASIA DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN

Menerapkan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di lingkungan organisasi melalui aspek perencanaan kinerja (penyusunan Renstra, penetapan kinerja, dan rencana kinerja tahunan) ; pengukuran kinerja (penetapan IKU dan IKK); pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja (penyusunan laporan kinerja (LAKIP), evaluasi kinerja (reviu terhadap kinerja oleh APIP) dan capaian kinerja (realisasi kinerja dan keuangan), sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- a. Mendukung pembinaan komitmen anti korupsi di tiap eselon I lingkup kementerian pertanian melalui gerakan WBK (Wilayah bebas dari Korupsi)
- b. Memberikan pemahaman kepada setiap aparatur negara mengenai pembinaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sesuai amanah Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008
- c. Pemberian pelayanan prima kepada masyarakat / publik secara konsisten dan berkelanjutan melalui pendekatan 1 pintu dan 1 atap dalam bidang : sertifikasi dan pengujian mutu benih, proteksi tanaman perkebunan, analisis mutu dan residu pestisida, data serangan OPT, rekomendasi pengendalian OPT, klinik tanaman. Selain itu juga mendorong inovasi pelayanan publik. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta penguatan kapasitas dan efektivitas

pengawasan pelayanan publik

- d. Mendukung penciptaan teknologi informasi publik dan kehumasan dalam ruang lingkup e – government baik dalam bentuk web maupun sarana informasi lainnya seperti SIMPEG, SIMONEV, e-proposal, dll
- e. Mendorong perbaikan sarana dan prasarana lingkungan kerja serta penerapan manajemen modern dalam pelaksanaan kegiatan balai
- f. Mengembangkan mekanisme kontrol yang tepat, sinergis, realistis, inovatif, terukur, konsisten, efektif dan efisien terhadap sistem manajemen organisasi terhadap simpul-simpul kritis pelaksanaan organisasi dalam menghadapi segala permasalahan dalam organisasi
- g. Menerapkan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kinerja organisasi
- h. Melaksanakan reformasi birokrasi melalui program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan penganggaran yang berbasis kinerja.
- i. Mendukung penguatan pengawasan instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 23 tahun 2009 tentang Pedoman Umum SPI, terbentuknya satlak SPIP, peningkatan peran APIP sebagai QA.
- j. Mendorong penataan sistem manajemen SDM aparatur pada kegiatan pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, SOP Kegiatan, evaluasi jabatan, standar dan profil kompetensi jabatan, penilaian prestasi kerja, disiplin pegawai, pendidikan / pelatihan, berbasis kompetensi melalui workshop, seminar dll, pengembangan jabatan fungsional, pengelolaan SIMPEG dll

2.4. VISI, MISI DAN TUJUAN BBPPTP SURABAYA 2020-2024

1. Visi BBPPTP Surabaya

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Pertanian tahun 2020 – 2024

“PERTANIAN YANG MAJU, MANDIRI DAN MODERN UNTUK TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

dan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020 – 2024 yaitu

“PERKEBUNAN INDONESIA YANG PRODUKTIF, BERNILAI TAMBAH DAN BERDAYA SAING DALAM MEWUJUDKAN PERTANIAN INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG UNTUK Mendukung Tercapainya Visi Presiden Republik Indonesia”

Maka Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya menetapkan visi BBPPTP Surabaya tahun 2020-2024 yaitu :

“Menjadi Balai yang Profesional dalam Melaksanakan Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Serta Pengembangan dan Penyiapan Teknologi Proteksi Dalam Mewujudkan Perkebunan Indonesia yang Produktif, Bernilai Tambah dan Berdaya Saing”

Perwujudan dari Visi BBPPTP Surabaya tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam kisi-kisi perumusan visi yang memuat makna-makna dari visi itu sendiri.

Tabel. 15. Kisi-kisi Perumusan Visi Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2020-2024

No	Pokok- Pokok Visi	Makna Visi
1	Profesional	Menjadikan sikap / kepribdian yang cakap untuk melakkan aktivitas sesuai kemahiran, kemampuan dan keahlian serta mengedepankan integritas dan komitmen berdasarkan tugas dan fungsi organisasi serta
2	Sertifikasi benih	Proses / rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oelh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium, dan pengawasan dan memenuhi semua persyaratn yang diedarkan
3	Pengujian mutu benih	Kegiatan untuk menganalisa mutu benih dilaboratorium yang meliputi penetapan kadar air, daya berkecambah, kemurnian fisik dan kesehatan benih berdasarkan metode baku dan dilakukan terhadap setiap kelompok benih (lot) yang akan diedarkan
4	Pengembangan	Rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas menjadi lebih baik
5	Penyiapan	Menyediakan sesuatu yang dibutuhkan
6	Teknologi	Entitas, benda maupun tak benda yang diciptakan secara terpadu melalui pembuatan dan pemikiran untuk mencapai suatu nilai
7	Proteksi tanaman perkebunan	Segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman perkebunan yang diakibatkan oleh organisme pengganggu
8	Produktif	produksi komoditas perkebunan Indonesia semakin meningkat dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun dalam memenuhi kebutuhan ekspor. Peningkatan produksi tentunya dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas maupun luas panen tanaman perkebunan nasional
9	Bernilai tambah	produk perkebunan Indonesia mampu dihilirisasi, tidak menjual bahan mentah, dan mampu menyajikan produk olahan perkebunan yang mampu meningkatkan harga jual komoditas perkebunan nasional. Peningkatan harga jual ini diharapkan dapat meningkatkan nilai tukar perkebunan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun nasional

10	Berdaya saing	<p>produk perkebunan nasional mampu bersaing dengan produk impor sejenis maupun produk ekspor sejenis dari negara lain dalam konteks impor, jika produk perkebunan nasional berdaya saing, maka jumlah impor produk perkebunan dapat diturunkan baik melalui produk sejenis maupun produk substitut sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat.</p> <p>Sedangkan dalam konteks ekspor, berdaya saing berarti bahwa produk perkebunan nasional menjadi pilihan utama negara tujuan ekspor dibanding dengan produk perkebunan</p>
----	---------------	--

2. Misi BBPPTP Surabaya

1. Mewujudkan Pelaksanaan sertifikasi dan pengujian mutu benih serta pengawasan benih secara cepat, tepat dan akurat;
2. Mewujudkan dukungan penyediaan benih tanaman perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan melalui pengembangan dan tata kelola nursery tanaman perkebunan yang professional;
3. Mewujudkan dukungan perlindungan perkebunan melalui inovasi teknologi proteksi yang ramah lingkungan dalam mengatasi gangguan OPT dan gangguan usaha perkebunan serta pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida;
4. Mewujudkan pelayanan yang prima dan berkualitas sebagai implementasi reformasi birokrasi kepada masyarakat melalui pelayanan data dan informasi serta dukungan teknis lainnya dalam bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan,
5. Mewujudkan dukungan pelayanan organisasi yang berkualitas dalam urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai.

3. Tujuan BBPPTP Surabaya

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBPPTP Surabaya, maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu :

1. Memberikan pelayanan sertifikasi dan pengujian mutu benih secara cepat, tepat dan akurat dalam mendukung penyediaan benih unggul, bermutu dan bersertifikat.
2. Menyediakan benih perkebunan yang bermutu dan berkelanjutan kepada masyarakat pekebun
3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan teknis kebun sumber benih tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar di wilayah kerja BBPPTP Surabaya
4. Menyediakan teknologi perlindungan perkebunan yang ramah lingkungan dalam pemantauan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta penanganan gangguan usaha perkebunan.
5. Meningkatkan dan mengembangkan ketersediaan Agens Pengendali Hayati (APH) dan pupuk hayati.
6. Memberikan pelayanan analisis mutu dan residu pestisida pada produk-produk perkebunan dengan memperhatikan isu-isu lingkungan.
7. Meningkatkan mutu layanan data dan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan dengan menggunakan teknologi informasi kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.
8. Melakukan upaya strategis dan bimbingan teknis sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan pengembangan jejaring kerjasama laboratorium.
9. Memberikan pelayanan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga balai.
10. Meningkatkan inovasi pelayanan public sebagai implemnetasi reformasi birokrasi

2.5. KEGIATAN BBPPTP SURABAYA TAHUN 2020-2024

1. Kegiatan BBPPTP Surabaya

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor : 08 / Permentan / OT.140/ 2/ 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, merupakan unit kerja eselon 2 b dengan tugas :

- 1) melaksanakan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih;
- (2) melaksanakan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan dan
- (3) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas BBPPTP Surabaya menyelenggarakan fungsi :
 1. Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional
 2. Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor dan yang akan diekspor serta rekayasa genetika.
 3. Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas
 4. Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas
 5. Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar
 6. Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas propinsi
 7. Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (referee test)
 8. Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tumbuhan (OPT)perkebunan
 9. Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi
 10. Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi

11. Pengembangan teknik surveillance OPT penting
12. Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil dan teknik pengendalian OPT perkebunan
13. Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan
14. Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas dan pelepasan agens hayati OPT Perkebunan
15. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan
16. Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu
17. Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida
18. Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
19. Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
20. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
21. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan
22. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar

Sasaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyediaan teknologi proteksi tanaman perkebunan adalah terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyediaan teknologi proteksi tanaman perkebunan dengan fokus kegiatan pengembangan tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Sertifikasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan

Dalam mendukung peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas perkebunan, maka BBPPTP Surabaya mendukung dan mengawal penerapan standar mutu komoditas perkebunan melalui sertifikasi lapang dan pengujian mutu benih tanaman dengan target indikator kinerja mencapai proyeksi rata – rata 118 juta batang per tahun. Selain komoditas tebu juga akan dilakukan sertifikasi dan pengujian mutu benih untuk komoditas : kopi, kakao, kelapa, jambu mete, tembakau, kapas, wijen, jarak pagar dan jarak kepyar.

2. Produksi dan Penyediaan Benih Bermutu dan Berkelanjutan

Nurseri tanaman perkebunan yang telah dikembangkan oleh BBPPTP Surabaya di beberapa sentra pengembangan kawasan perkebunan untuk komoditas kopi, kakao, tebu, kelapa dan jambu mete diharapkan dapat mendukung penyediaan benih bermutu dan berkelanjutan yang tepat mutu, waktu, lokasi dan harga.

3. Pembangunan kebun contoh, uji demplot dan uji koleksi

Uji coba teknologi perlindungan tanaman melalui demplot dimaksudkan untuk menguji Agens Pengendali Hayati (APH) / Pupuk Hayati, Feromon, Pestisida Nabati yang telah dihasilkan untuk diuji keefektifannya dilapang. Kegiatan demplot ini selain dilaksanakan oleh Balai juga dilaksanakan oleh UPTD wilayah Kerja Bidang Proteksi melalui kegiatan perikatan. Pelaksanaan demplot difokuskan pada komoditi unggulan daerah yaitu : Tebu, Kopi, Tembakau, Kapas, teh, nilam dan kelapa dengan target indikator kinerja mencapai proyeksi rata – rata 30 unit pada akhir tahun 2019.

4. Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan

Rakitan teknologi yang dihasilkan Untuk menghasilkan rakitan teknologi spesifik lokasi, maka BBPPTP Surabaya menjalin kerjasama dengan beberapa Perguruan Tinggi untuk menghasilkan produk berupa Agens Pengendali Hayati yang telah diformulasikan,

Pupuk Hayati, maupun Feromon dengan target indikator kinerja mencapai proyeksi rata-rata 9,8 pada akhir tahun 2019.

5. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati Sasaran dari kegiatan eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan dan pengujian agensia mendapatkan Agens Pengendali Hayati minimal rata-rata 3 APH setiap tahunnya dari golongan Bakteri, Jamur, Nematoda, Predator maupun parasitoid yang dapat dikembangkan melalui laboratorium.
6. Koordinasi pembinaan, monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan Kegiatan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi bertujuan untuk mengawasi kualitas (quality control) pelaksanaan kegiatan dan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBPPTP Surabaya. Monitoring dan evaluasi berkaitan dengan hal-hal :
 - (1) aktivitas proses kegiatan ;
 - (2) kinerja yang dicapai dan hasil proses kegiatan dan
 - (3) identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya
7. Pengembangan desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan

Sasaran dari kegiatan ini adalah tercapainya 12 desa pertanian organik berbasis komoditas perkebunan yang berhasil tersertifikasi sampai dengan tahun 2021 oleh lembaga sertifikasi organik yang terakreditasi. Komoditas yang akan dikembangkan untuk desa pertanian organik meliputi : kopi dan kakao yang eksisting telah dikembangkan oleh kelompok tani.
8. Layanan Perkantoran

Kegiatan layanan perkantoran difokuskan pada administasi keuangan seperti belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
9. Layanan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Kegiatan layanan ini difokuskan pada pelaksanaan urusan kepegawaian dengan penggunaan SISTEM INFORMASI MANAJEMEN, ketata usaha organisasi termasuk administrasi pemerintahan dan rumah tangga BBPPTP Surabaya. Mengoptimalkan kondisi dan fungsi sarana dan prasarana melalui pencatatan dalam SIMAK-BMN dan pemeliharaan fisik yang rutin dan berkelanjutan.

10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Dalam upaya meningkatkan efektivitas kinerja BBPPTP Surabaya maka diperlukan peningkatan sarana prasarana baik yang bersifat teknis maupun administratif melalui pengadaan barang dan jasa, Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan.

11. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam upaya meningkatkan standar pelayanan publik maka diupayakan untuk terus mengembangkan metode, teknik dan aplikasi dengan memanfaatkan big data dan IOT

Tabel. 16. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Perbenihan Tahun 2020 – 2024

IKA	Target					PENANGGUNG JAWAB IKA	METODE CASCADING	
	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan (Layanan)	6	6	6	6	6	Bidang Perbenihan	
A	Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	18 hari kerja	17	17	16	15	Seksi Layanan Teknis dan Informasi Perbenihan	Buat baru (mandatory)
B	Jumlah akreditasi laboratorium perbenihan tanaman perkebunan sesuai standar internasional	2	3	3	3	3	Seksi Jaringan Laboratorium Perbenihan	Buat baru (mandatory)

Tabel. 17 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bidang Proteksi Tahun 2020 – 2024

IKU	Target					PENANGGUNG JAWAB IKU	METODE CASCADING	
	2020	2021	2022	2023	2024			
1	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan (Layanan)	6	6	6	6	6	Bidang Proteksi	
A	Waktu maksimal layanan publik yang diberikan (rata-rata)	27 hari kerja	27 hari kerja	26 hari kerja	25 hari kerja	24 hari kerja	Seksi Layanan Teknis dan Informasi Proteksi	Buat baru (mandatory)
	Waktu maksimal layanan publik identifikasi OPT dan rekomendasi pengelolaan OPT perkebunan yang diberikan	20 hari kerja	20 hari kerja	20 hari kerja	18 hari kerja	18 hari kerja		
	Waktu maksimal layanan publik penyediaan data dan informasi OPT yang diberikan	1 hari kerja						
	Waktu maksimal layanan publik penyediaan produk formulasi APH dan pupuk hayati yang diberikan	90 hari kerja	90 hari kerja	83 hari kerja	83 hari kerja	76 hari kerja		
	Waktu maksimal layanan publik penyediaan isolat APH yang diberikan	21 hari kerja	21 hari kerja	21 hari kerja	18 hari kerja	18 hari kerja		
	Waktu maksimal layanan publik pengujian mutu APH yang diberikan	14 hari kerja						

Tabel. 18. Indikator Kinerja Satuan Kerja (IKSK) BBPPTP Surabaya Tahun 2020 – 2024

Kode SK	IKSP/IKSK		Target					PENANGGUNG JAWAB IKSP/IKSK	METODE CASCADING
			2020	2021	2022	2023	2024		
SK 1	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BBPPTP Surabaya	3	3	3	3	3	Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	
	A	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi tanaman perkebunan	6	6	6	6	6	Bidang Proteksi	
	B	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan	6	6	6	6	6	Bidang Perbenihan	

3.2. PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala BBPPTP Surabaya.

Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran kegiatan, indikator kinerja, target kinerja dan anggaran. Dokumen Penetapan Kinerja tersebut dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk :

- 1) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- 2) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja;
- 3) Menilai keberhasilan organisasi.

Tabel 19. Perjanjian Kinerja (PK) BBPPTP Surabaya TA. 2021

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN (BBPPTP) SURABAYA

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman Perkebunan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6 Layanan
2	Tersedianya Benih Tanaman Perkebunan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi Perbenihan BBPPTP Surabaya	6 Layanan
3	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya	3 Skala likert (1-4)

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan maupun

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. BBPPTP Surabaya telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2021 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021.

3.1. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya.

Pengukuran kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran yaitu setelah berakhirnya semua kegiatan untuk mengetahui pencapaian sasaran kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan atau target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (PK).

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan, maka sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu :

- 1) Sangat Berhasil (capaian > 100%)
- 2) Berhasil (capaian 80% - 100%)
- 3) Cukup berhasil (capaian 60%-<80%)
- 4) Kurang berhasil (capaian <60%)

Capaian kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya untuk setiap pernyataan kinerja. Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBPPTP Surabaya TA. 2021

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi proteksi BBPPTP Surabaya	6 layanan	6 layanan	100
2	Tersedianya benih tanaman perkebunan	Jumlah layanan rekomendasi data dan informasi perbenihan BBPPTP Surabaya	6 layanan	6 layanan	100
3	Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya yang diberikan	3 Skala Likert (1-4)	3 Skala Likert (1-4)	100

Dari Tabel diatas bisa dilihat dan dijelaskan bahwa :

- a) Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman perkebunan yang terdapat target 6 Layanan dan terealisasikan 6 layanan sehingga prosentase capaian 100%, yang 6 layanan terdiri dari
 - a. Pengujian Mutu Agens Pengendali Hayati (APH)
 - b. Pengujian Mutu Formulasi Pestisida, Residu Pestisida dan Logam Berat
 - c. Layanan Penyediaan Isolat Agens Pengendali Hayati (APH)
 - d. Layanan Penyediaan Formulasi APH dan Pupuk Hayati
 - e. Layanan Identifikasi OPT dan Rekomendasi Pengelolaan OPT
 - f. Layanan Penyediaan Data dan Informasi OPT
- b) Tersedianya benih tanaman perkebunan terdapat target 6 Layanan dan terealisasikan 6 layanan sehingga prosentase capaian 100%, yang 6 layanan terdiri dari
 - a. Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan Di Wilayah Kerja
 - b. Pengujian Mutu Benih Laboratorium
 - c. Pengawasan Sumber Benih
 - d. Pelaksana Uji Profisiensi
 - e. Pengawasan Peredaran Benih
 - f. Produksi Benih
- c) Terwujudnya birokrasi Direktorat Jenderal Perkebunan yang efektif dan efisien memiliki Target 3 Skala Likert (1-4) dan terealisasikan 3 Skala Likert (1-4) sehingga prosentase capaian 100%.

Hasil pengolahan data Pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat pada Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya adalah :

- a. Nilai Rata-Rata Tertimbang : 3.52
- b. IKM Unit Pelayanan : 87.99
- c. Mutu Pelayanan : B
- d. Kinerja UKPP : Baik

Dari 9 unsur pelayanan nilai yang tertinggi adalah :

- Penanganan pengaduan (U 8) : 3.95

Sedangkan unsur pelayanan yang terendah adalah :

- Biaya / Tarif (U 4) : 3.17

Dari 9 unsur pelayanan yang mendapatkan penilaian terendah adalah Biaya / Tarif (U 4). Unsur tersebut mendapat penilaian dari responden rendah disebabkan :

- Biaya/tarif yang dikeluarkan oleh pengguna jasa merupakan bagian dari Pendapatan Negara bukan Pajak (PNBP) yang telah ditetapkan secara resmi dalam peraturan (PP No. 35 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian).

Rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah :

- Memberikan penjelasan kepada pelanggan/ pengguna jasa terkait dengan tarif PNBP yang sudah ditetapkan baik secara langsung maupun melalui media (website dan media sosial balai). Sehingga pelanggan / pengguna jasa dapat memperkirakan rincian biaya yang akan dikeluarkan sebelum pengajuan permohonan
- BBPPTP Surabaya telah meningkatkan pelayanan antara lain dengan mempersingkat waktu pelayanan sehingga hasilnya dapat segera diperoleh masyarakat

Standar kinerja ini merepresentasikan capaian kinerja BBPPTP Surabaya dan diwujudkan sebagai indikator keberhasilan kinerja BBPPTP Surabaya. Dalam upaya mewujudkan target kinerja yang direncanakan kegiatan sesuai pada kontrak kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka pendek maupun jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Implementasi IKK dalam kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 .

3.2. EVALUASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Realisasi Anggaran

Untuk mewujudkan sasaran kegiatan organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja maka pada tahun 2021 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya mendapatkan dukungan alokasi anggaran dari APBN sebesar **Rp. 147.150.647.000,-**. Anggaran ini digunakan untuk melaksanakan Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan **(1779)**, Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar **(1777)**, Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah **(5888)**, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan **(1780)**, dan Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan **(5890)**. Dari total pagu anggaran tersebut diatas realisasinya adalah sebesar **Rp. 133.275.394.257,-** atau mencapai **90,57%**. Adapun rinciannya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 21. Realisasi Anggaran BBPPTP Surabaya T. A. 2021 (per output)

KODE	KEGIATAN/OUTPUT	KEUANGAN		
		PAGU	REALISASI	%
		(Rp.)	(Rp.)	
'018.05.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	126.625.323.000	113.393.130.788	89,55
1777.RAI.009	Kawasan Kopi (PEN)	20.110.856.000	19.069.396.752	94,82
1777.RAI.010	Kawasan Kelapa (PEN)	9.000.685.000	7.643.116.420	84,91
1777.RAI.011	Kawasan Jambu Mete (PEN)	3.274.800.000	2.784.074.183	85,01
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan)	2.980.710.000	2946371393	98,84
1779.ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	105.419.000	104.527.614	99,15
1779.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan	487.439.000	483.209.080	99,13

	Hidup			
1779.PDC	Sertifikasi Produk	2.023.632.000	1.994.454.699	98,55
1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	364.220.000	364.180.000	99,98
5888	Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah	70.778.870.000	62.239.996758	87,93
5888.RAI.004	Kawasan Tebu	43.465.000	42.814.000	98,50
5888.RAI.008	Kawasan Tebu (PEN)	70.735.405.000	62.197.182.758	87,92
5890	Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan	18.791.702.000	17.238.357.181	91,73
5890.AEA.001	Koordinasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan	50.000.000	45.401.952	90,80
5890.BJA.001	Pengawasan Benih Komoditas Perkebunan	658.468.000	604.314.836	91,77
5890.BJA.002	Pengujian Mutu Benih	297.040.000	290.546.360	97,81
5890.RBK.001	Nursery	4.094.040.000	4.017.221.101	98,12
5890.RBK.002	Nursery (PEN)	13.692.154.000	12.280.872.932	89,69
018.05.WA	Program Dukungan Manajemen	20.525.324.000	19.366.360.408	94,35
1780.EAA.002	Layanan Perkantoran UPT Pusat	13.652.435.000	12.878.732.101	94,33
1780.EAB.002	Layanan Perencanaan UPT Pusat	742.140.000	635.394.281	85,61
1780.EAB.004	Layanan Perbendaharaan Internal UPT Pusat	165.000.000	164.996.506	99,99
1780.EAB.006	Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara UPT Pusat	165.900.000	149.954.250	90,38
1780.EAC.003	Layanan Kerumahtanggaan UPT Pusat	1.663.512.000	1.531.371.282	91,05
1780.EAC.005	Layanan Pengadaan UPT Pusat	320.000.000	311.742.455	97,41
1780.EAD.002	Layanan Sarana Internal	2.632.737.000	2.583.790.820	98,14

	UPT Pusat			
1780.EAE.002	Layanan Prasarana Internal UPT Pusat	619.000.000	618.863.728	99,97
1780.EAF.002	Layanan Manajemen SDM UPT Pusat	343.200.000	283.568.450	82,62
1780.EAL.002	Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT Pusat	221.400.000	207.946.535	93,92

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Tabel 22. Capaian Kinerja BBPPTP Surabaya Tahun 2021 dibandingkan dengan capaian kinerja beberapa tahun terakhir

TAHUN	KEGIATAN	PAGU	TARGET		REALISASI			KINERJA	
			KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN		FISIK	KEUANGAN	FISIK
			(%)	(%)	(Rp.)	(%)	(%)	(%)	(%)
2017	Program	19.942.554.000	100	100	18.770.815.629	94,12	100	94,12	100
2018	Peningkatan Produksi	59.974.213.000	100	100	46.683.321.488	77,84	100	77,84	100
2019	Komoditas Perkebunan	32.874.177.000	100	100	31.766.069.354	96,63	100	96,63	100
2020	Berkelanjutan	59.931.066.000	100	100	55.295.929.780	92,26	100	92,26	100
2021	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen	147.150.647.000	100	100	133.275.394.257	90,57	95	90,57	95

Pada tabel tersebut terlihat bahwa capaian kinerja dari tahun 2017 sampai tahun 2021 untuk realisasi keuangan mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini disebabkan karena alokasi pagu kegiatan setiap tahun berbeda – beda, sehingga berpengaruh terhadap realisasi keuangan yang dicapai. Sedangkan untuk realisasi fisik kegiatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020 secara umum mengalami kenaikan, kecuali di tahun 2021 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya banyak

kegiatan baru sebelumnya tidak ada, antara lain Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah (5888), Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar (1777) yang melibatkan beberapa stake holder pihak eksternal, baik Kedinasan, Puslit/Balit, Pemda dan Institusi lainnya. Selain itu di tahun 2018 ini, realisasi keuangan capaiannya mengalami penurunan dari tahun 2017. Hal ini disebabkan karena adanya serapan anggaran untuk kegiatan ketersediaan benih gratis untuk beberapa komoditi hanya memerlukan biaya transport dan selain itu karena sebagian besar benih tersebar di wilayah Jawa yang harga satuan benihnya di bawah perencanaan.

❖ Pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan prosentase kinerja pada realisasi keuangan disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. refofusing anggaran oleh Eselon 1 yang sering terjadi karena adanya program penanggulangan wabah Covid-19, sehingga banyak kegiatan yang tertunda sehingga mengakibatkan capaian realisasi rendah,
2. pengetatan aturan pemerintah untuk tetap di rumah dan pembatasan sosial dalam skala besar,
3. pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimana untuk melakukan kegiatan atau perjalanan diluar daerah harus menggunakan syarat – syarat tertentu seperti test SWAB Antigen Covid-19, test PCR Covid-19, mempunyai kartu vaksin, Pengunduhan aplikasi E-Hac disetiap berpergian, Surat Jalan dari Pemerintah setempat, aturan Karantina setiap setelah pulang dari perjalanan.
4. Koordinasi dengan instansi lain yang masih dirasa belum maksimal (dilakukan secara daring/online)
5. Masih banyaknya kendala/waktu /proses yang dilalui oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa, yang dalam hal ini dalam bentuk Lelang
6. Masih belum tersedianya CP/CL untuk kegiatan yang berbasis MAK 526 (belanja yang diserahkan kepada Masyarakat/Pemda/)

Secara umum, dengan melihat keseluruhan realisasi pada tabel tersebut, dapat disampaikan/disimpulkan bahwa secara kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya dapat terlaksana dengan baik dan tidak mengalami hambatan yang berarti meskipun dengan penyelesaian progres kegiatan selesai di penghujung tahun anggaran.

- ❖ Perhitungan efisiensi kegiatan di Tahun Anggaran 2021 mengikuti formula sesuai dengan PMK No. 214 Tahun 2017 sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - RAK_i)}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAK_i : Pagu anggaran keluaran i

RAK_i : Realisasi anggaran keluaran i

CK_i : Capaian keluaran i

Dengan realisasi anggaran mencapai 90,57% dan capaian kinerja fisik kegiatan yang mencapai 95 % maka efisiensi penggunaan anggaran Tahun 2021 adalah berdasarkan perhitungan berikut :

$$E = \frac{(147.150.647.000 \times 90,57\%) - 133.275.394.257}{(147.150.647.000 \times 90,57\%)} \times 100\%$$

$$= 2,000007903\%$$

Dengan efisiensi penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Tahun 2021 adalah efisien karena menurut PMK No. 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi

Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%.

❖ Secara umum langkah-langkah yang telah dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja seperti:

- (1) pengoptimalan alokasi waktu pelaksanaan kegiatan dan percepatan realisasi kegiatan;
- (2) mengoreksi tahapan kegiatan yang menjadi bottleneck;
- (3) meminimalkan waktu yang terbuang (wasting time);
- (4) menyesuaikan rencana kegiatan dengan kondisi di lapangan;
- (5) monitoring pelaksanaan kegiatan di daerah;
- (6) Penguatan koordinasi pusat dan daerah.

(7) Membuat Skala prioritas pekerjaan Kontrak yang akan dikerjakan
Selain itu, untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun-tahun mendatang, diperlukan dukungan dan peran serta aktif unit di Pusat dan Satker pada Direktorat Jenderal Perkebunan, unit organisasi terkait lainnya dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan serta masyarakat. Dukungan tersebut merupakan pendorong utama dalam pencapaian kinerja dan sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

❖ Langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang antara lain:

- (1) evaluasi pencapaian kinerja tahun sebelumnya;
- (2) kendala-kendala yang terjadi di tahun sebelumnya dijadikan masukan untuk mematangkan perencanaan ke depan;
- (3) meminimalkan kegiatan-kegiatan yang sulit untuk direalisasikan;
- (4) evaluasi Renstra;
- (5) peningkatan peran perguruan tinggi;
- (6) sosialisasi, Koordinasi, komunikasi yang bagus secara terus-menerus dan lain-lain.

Upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya merupakan laporan kinerja tahunan yang disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun 2021.

Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun 2021 mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan 5 (lima) kegiatan yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsinya yaitu Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar, Penguatan Perlindungan Perkebunan , Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah , Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan , Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan.

Realisasi penyerapan anggaran adalah sebesar Rp. **133.275.394.257,-** dari total pagu anggaran sebesar Rp. **147.150.647.000,-** atau mencapai **90,57%** dengan capaian fisik sebesar 85%, bahkan beberapa sasaran terwujud dengan capaian 100%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya pada tahun anggaran 2021 terlaksana dengan baik.